

**PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA  
TERHADAP IDEOLOGI PARTAI IKHWÂNUL  
MUSLIMÎN DI MESIR**

**Oleh**

**AZHIMAH**

**NIM : 3001164011**

**PROGRAM STUDI  
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
2019**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAKSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Batasan Istilah</b> .....	13
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	15
<b>E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian</b> .....	17
<b>F. Landasan Teori</b> .....	17
<b>G. Kajian Terdahulu</b> .....	18
<b>H. Metodologi Penelitian</b> .....	21
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	24
<b>BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA</b>	
<b>A. Latar Belakang Internal</b> .....	26
<b>B. Latar Belakang Eksternal</b> .....	34
<b>C. Corak pemikiran Hasan Al-Banna</b> .....	35
<b>D. Sikapnya Terhadap Barat dan Ekonomi</b> .....	41
<b>BAB III PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA</b>	
<b>A. Pemikiran Tentang Politik dan Pemerintahan</b> .....	51
<b>B. Pemikiran Tentang Rakyat</b> .....	61
<b>C. Pemikiran Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan</b> .....	63
<b>D. Pemikiran Tentang Hukum</b> .....	67
<b>E. Pemikiran Tentang Hubungan dengan Negara Lain</b> .....	68

**BAB IV    PENGARUH    PEMIKIRAN    HASAN    AL-BANNA  
TERHADAP    IDEOLOGI    DAN    PERGERAKAN  
IKHWÂNUL MUSLIMÎN DI MESIR**

A. Pengaruh Pemikiran Hasan al-Banna terhadap Ideologi Ikhwânul Muslimîn .....	70
B. Mendirikan Ikhwânul Muslimin.....	76
E. Pengaruh Pemikiran Hasan al-Banna terhadap Sistem Pemerintahan dan Khilafah .....	87
F. Pengaruh Teori Maslahat Hasan al-Banna.....	
G. Pengaruh Pemikiran Hasan al-Banna terhadap Pergerakan Ikhwân al-Muslimîn .....	95

<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>104</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'âlamîn*, artinya, agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam, maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Nabi Muhammad Saw diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah *rahmatan lil'alamîn*, Islam adalah rahmat bagi seluruh manusia. rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang.

Islam juga merupakan agama yang universal, sesuai dengan firman Allah QS. al-Anbiyâ', Ayat : 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya : Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. al-Anbiya, Ayat : 107).<sup>1</sup>*

Begitu juga agama Islam membawa konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti, politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Dalam bidang politik, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik Integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi Muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda.

Dalam gerakan Islam muncul nama-nama terkenal karena pemikiran dan aktivitasnya yang cukup menonjol dalam memperjuangkan Islam, salah satunya

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), h. 331.

adalah Hasan Al-Banna. Dialah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin yang sampai sekarang masih menggema diseluruh pelosok bumi. Pemikiran yang cukup luas dan aktivitasnya diberbagai tempat telah melahirkan penafsiran yang beragam tentang *al-Manhaj* (metode) dan model dari gerakan Ikhwanul Muslimin.<sup>2</sup>

Hasan Al-Banna dianggap sebagai pionir kebangkitan peradaban Islam, ia melakukan serangkaian usaha gerakan kebangkitan Islam kontemporer yang porosnya pada organisasi *al-Ikhwân al-Muslimîn*, yang kemudian mampu mempengaruhi banyak masyarakat Mesir melalui *halaqah*.<sup>3</sup>

Al-Ikhwân al-Muslimîn, sebagai tercatat dalam sejarah Berjaya dalam melaksanakan dakwah bagi masyarakat Mesir dan mempengaruhi corak keberagaman dan bahkan paham keagamaan banyak masyarakat Mesir.

Karena demikian pentingnya pengaruh organisasi ini di Mesir hingga pada masa selanjutnya organisasi ini bukan hanya bergerak dalam dakwah tetapi telah merambah dunia politik dan menjadi partai politik.

Al-Banna memiliki pengaruh yang sangat penting, baik dalam hal dakwah maupun dalam gerakan politik, atau bahkan dapat disebut gerakan politik berbasis dakwah Islam.

Pengaruh tersebut dapat disebut menjadi istimewa karena pemikiran al-Banna bukan saja berpengaruh dalam konsep dan pemikiran melainkan juga dalam gerakan aktifitas politik.

Pengaruh tersebut tampak menjadi sangat penting untuk dikaji, bukan saja untuk mengetahuinya tetapi boleh jadi untuk menjadi model dalam pengaruh pemikiran terhadap gerakan dalam sejarah dan perkembangan Islam, Itulah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

---

<sup>2</sup>Hasan bin Falâh Al Qahthâni. *Ummu Udhmâ 'Azhminâ*, terjemahan ke bahasa Indonesia, *Pedoman Harakah Islamiyah*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), h. 15.

<sup>3</sup>*Halaqah* disini adalah lingkaran orang-orang yang sedang mempelajari ilmu agama dengan berkelompok-kelompok serta membentuk lingkaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Pemikiran Politik Hasan al-Banna terhadap Ideologi Ikhwân al-Muslimîn di Mesir”.

Untuk memudahkan dalam menganalisis dan memahaminya, masalah pokok ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran politik Hasan al-Banna.
2. Bagaimana pengaruh pemikiran politik Hasan al-Banna terhadap ideologi dan gerakan Ikhwân al-Muslimîn di Mesir
3. Bagaimana perkembangan pengaruh itu dalam pergerakan Ikhwân al-Muslimîn di Mesir.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang simpang siur terhadap judul penelitian ini dan berbagai istilah kuncinyang terdapat di dalamnya, maka peneliti menjelaskan beberapa batasan istilah atau kata kunci yang digunakan di dalamnya.

### *1. Pengaruh*

Secara etimologis, kata “pengaruh” bermakna daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.”<sup>4</sup>

Hasan Al Banna berjuang dengan melalui jamaah yang didirikannya sekaligus dipimpinya pada masa-masa awal. Jamaah itu adalah Ikhwânul Muslimîn. Ia merupakan gerakan dakwah abad ke empat belas Hijriyah, yang mempunyai pengaruh yang sangat luas diseluruh penjuru dunia.<sup>5</sup> Ia adalah da’i dan reformis yang mempunyai catatan yang cemerlang dan terhormat, yang

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 849.

<sup>5</sup>Fathi Yakan. *Perjalanan Aktivitas Gerakan Islam*, terj. Aunur Rafiq Saleh. (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), h. 60.

semakin memperindah sejarah Islam dan dakwah. Dunia sejak berabad-abad sebelumnya-belum pernah mengenal adanya kepemimpinan yang lebih kuat, berpengaruh dan lebih besar pruduknya melebihi kepemimpinan ini.<sup>6</sup>

Ia juga saling menopang dalam membentuk harakah Islam, yang didunia Arab khususnya jarang ditemukan satu harakah yang lebih luas jangkauannya, lebih besar peranannya, lebih dalam pengaruhnya, lebih dalam responnya kedalam masyarakat, dan lebih dalam merasuknya pada jiwa, melebihi harakah ini. Hasan Al Banna adalah orang yang kuat optimismenya akan kemenangan dan penuh harap akan masa depan walaupun ia sendiri mengetahui dan merasakan rintangan-rintangan yang menghalangi jalannya.<sup>7</sup>

Dengan demikian pengaruh yang dimaksud disini adalah pengaruh daya yang timbul dari Hasana al-Banna, khususnya pemikirannya yang kemudian turut menentukan ideology dan pergerakan Ikhwân al-Muslimîn, baik semasanya atau masa sesudahnya.

## 2. *Pemikiran Politik*

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah hasil karya dan karsa yang yang dihasilkan seseorang berdasarkan intelektualnya<sup>8</sup> yang terkaiat dengan politik.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemikiran politik disini adalah pemikiran politik Hasan al-Banna yang berkaitan dengan politik, khususnya yang mempengaruhi ideology dan pergerakan Ikhwân al-Muslimîn.

## 3. *Hasan al-Banna*

Hasan al-Banna adalah seorang [emikir, da'I, dan pembahatu Islam yang lahir di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir pada hari Minggu, 14

---

<sup>6</sup>Hasan Al Banna. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. terj. Anis Matta, Lc dkk. (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 22.

<sup>7</sup> Yusuf Qordhowi. *Berita Kemenangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 108.

<sup>8</sup> Syahrin Harahap, *Matodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media), h. 16-18.

Oktober 1906 M., yang bertepatan dengan 25 Sya'bân 1324 H., Nama lengkap beliau, Hasan ibn Ahmad ibn 'Abdurrahman al-Banna.

Hasan al-Banna dikenal dunia Islam karena pemikiran-pemikiran dan gerakan dakwahnya yang sangat berpengaruh di dunia Islam, khususnya dikalangan Ikhwân al-Muslimîn, baik sema ahidupnya atau setelah dia wafat.

#### 4. Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “eidos” dan “logos”. *Eidos* berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Selanjutnya ideologi juga berasal dari kata idea (english) yang artinya gagasan, pengertian kata kerja yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa yunani berarti logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideology menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar pandangan ataupun paham. Sedangkan pengertian ideologi menurut *KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia)* terbagi menjadi 3, berikut penjelasannya :

- Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup
- Ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan
- Ideologi adalah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik<sup>9</sup>

Ikhwânul Muslimîn dianggap sebagian orang sebagai organisasi terbesar dizaman modern ini, karena ia mampu menyebar ke banyak negara, dimanapun ia berada maka Ikhwan bukan sekedar tersebar sebagai sebuah organisasi Islam semata, Ikhwan diadopsi dan dipakai oleh sangat banyak tokoh dan organisasi

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h. 645.



Islam lain. Dihampir semua tempat organisasi ini mengalami penindasan dari penguasa setempat, tapi Ikhwan terus berkembang dan terus mengalami evolusi serta penyesuaian dengan lingkungan barunya.<sup>10</sup>

Mesir merupakan saat pertama kalinya berbagai konsep yang dimiliki Ikhwan berkembang, mulai dari kehidupan yang sangat normal karena baru dalam perkembangan awal, sampai terlibat dalam perang dengan kaum penjajah lalu terkena pelarangan dan penangkapan juga mengalami masa sekarang.<sup>11</sup>

Gerakan Ikhwan dimulai di Isma'iliyyah kemudian beralih ke Kairo. Dari Kairo tersebar ke berbagai pelosok dan kota di Mesir. Akhir tahun 40-an, cabang Ikhwan di Mesir sudah mencapai 3000. Di setiap cabang memiliki anggota yang cukup banyak. Gerakan tersebut kemudian meluas ke negara-negara Arab. Ia berdiri kukuh di Suriah, Palestina, Yordania, Libanon, Iraq, Yaman dan lain-lain. Dewasa ini anggota dan simpatisannya tersebar di berbagai penjuru dunia. Diantaranya juga telah menyebar di Asia seperti Malaysia dan Indonesia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, *pertama*, Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pemikiran Hasan Al Banna, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah politik, sehingga diharapkan menjadi bahan kajian dalam bidang politik Islam.

Kedua, penelitian ini juga bertujuan bagaimana pengaruh pemikiran politik Islam Hasan al-Banna terhadap Ikhwânul Mismlimîn, organisasi dan kemudian menjadi partai Islam yang sangat berpengaruh di Mesir pada masanya.

Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi para pengambil kebijakan saat berpapasan dengan situasi yang dipengaruhi oleh Ikhwânul Muslimîn atau partai dan organisasi yang dipengaruhi oleh pemikiran seorang tokoh.

---

<sup>10</sup>Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 1999), h. 183 -184.

<sup>11</sup>Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, (Robbani Press. Jakarta. 2012),h. 53.

## **E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, dan politik Islam, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini bertujuan agar menjadi bahan kajian tentang sosok seorang Hasan Al-banna yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Mesir sehingga konsep pemikirannya tentang islam, politik, dan Negara banyak dianut oleh masyarakat Mesir, kemudian sampai saat ini konsep pemikiran Hasan Al-banna itu masih tetap dianut dan menjadi ideologi partai politik tidak hanya di Mesir tetapi diseluruh dunia idlam.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan umat islam khususnya bagi akademisi.

## **F. Landasan Teori**

Penelitian ini didasarkan berbagai teori yang terkait dengan pengaruh dan keterpangaruhan, khususnya dalam bidang kaaian politik Islam. Sehubungan dengan itu ada beberapa teori yang dipedomani di dalamaanya.

Para ualama dan cendekiawan Muslim, melakukan kajian yang sangat mendalam mengenai hubungan politik dan Islam.

Abul A'la al-Mududi, misalnya menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep politik yang lengkap. Sebab Islam merupakan ajaran yang universal, tnidak saja tentang ibadah tetapi juga mu'amalah, termasuk masalah-masalah politik. Pada saat yang sama Islam adalah agama yang dinamis, yang menerima perubahan dan

pembaharuan. Untuk itu Maududi mengedepankan teori penggabungan teokrasi dan demokrasi dalam teorinya yang terkenal, *Theo-Democrasi*.<sup>12</sup>

Persoalan hubungan antara Islam dengan negara telah menjadi persoalan yang sangat klasik dalam Islam. Hal tersebut karena pemikiran dan praktik politik adalah hasil pikiran manusia, sementara agama adalah ajaran yang diturunkan Allah Swt., untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dengan demikian telah terjadi perbedaan dalam melihat apakah ada ajaran tentang system politik dalam Islam atau tidak.

Sebagian ulama dan cendekiawan mengatakan bahwa dalam al-Qur'ân terhadap system politik, karena Islam adalah ajaran yang komprehensif, bukan hanya tentang ibadah tetapi juga tentang muamalah dan kehidupan yang lebih luas. Pendapat seperti ini dianut antara lain oleh al-Maududi dan Hasan al-Banna. Tetapi ada yang berpendapat bahwa dalam al-Qur'ân tidak terdapat ajaran tentang system politik. Yang ada adalah ajaran tentang nilai-nilai yang harus ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Pendapat seperti ini dianut oleh Thaha Husein dan Ali Abdul Razik serta pemikir liberal lainnya.<sup>13</sup>

Teori-teori sebagaimana dikemukakan di atas menjadi salah satu teori yang dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian ini. Dengan demikian diharapkan dapat digali bagaimana pengaruh pemikiran Hasan al-Banna terhadap ideology politik Ikhwânul Muslimîn.

## **G. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis terdapat sejumlah tulisan dan penelitian yang membicarakan Hasan al-Banna, namun belum ada tesis yang membahas tentang pemikiran politik Hasan Al-Banna serta pengaruhnya terhadap ideologi paratai Ikhwânul Muslimîn.

Diantara tulisan dan penelitian mengenai Hasan al-Banna diantaranya:

Hasan al-Banna telah pergi ke sisi Tuhannya. Ia pergi, sementara pondasi bangunan sudah sempurna. Ia gugur sebagai syahid sebagaimana yang ia inginkan, gugur di dalam merentas terobosan baru di antara terobosan-terobosan

---

<sup>12</sup> Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.417.

<sup>13</sup> *Ibid.*

pembangunan, yaitu terobosan memperdalam pondasi dalam memperkokoh dinding-dinding. Beribu-ribu pidato disampaikan, dan beribu-ribu risalah telah dikirimkan. Semua itu dimaksudkan al-Banna untuk mendidihkan semangat dakwah dalam diri Ikhwan, sebagaimana telah dibuat mendidih oleh darah yang tertumpah. Opini, pendapat dan pandangan kami tidak ubahnya boneka yang terbuat dari lilin, sehingga ketika kami mati demi boneka itu, mulailah ruh merayap masuk ke dalam dan memberinya kehidupan.”<sup>14</sup>

Perbedaan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian penulis lebih menekankan sejauh mana pengaruh pemikiran Hasan al-Banna terhadap pergerakan ideologi partai politik, perkembangannya serta bentuk nyata dari hasil pemikiran Hasan al-Banna pada situasi politik mesir saat ini.

Buku yang berbicara mengenai pemikiran Hasan al-Banna adalah *Pemikiran Moderat Hasan al-Banna*, yang ditulis oleh Musthofa Muhammad Thahan, Bandung, (Harakatuna Tahun 2007).

Diterangkan dalam buku ini secara umum tentang pemikiran Hasan al-Banna, mulai dari sistem Islam yang sangat sempurna dan menyeluruh sampai pada urusan ukhuwah, keikhlasan, dan jihad, termasuk juga perbaikan pada pemerintahan. Dan dalam buku ini menggambarkan tidak spesifik pada satu pokok permasalahan.<sup>15</sup>

Perbedaan Penelitian yang penulis lakukan adalah penulis menekankan pada sisi pemikiran politik al-Banna, kemudian pengaruh pemikiran politik Hasan al-Banna dalam partai politik di Mesir.

Penelitian lain yang menyelidiki pemikiran Hasan al-Banna adalah tesis yang berjudul *Pemikiran Politik Hasan Al Banna (Studi Tentang Konsep Kelembagaan Politik Menurut Hasan Al Banna)* ditulis oleh Safrudin pada tahun 2011 dari universitas muhammadiyah Yogyakarta didalam Tesis ini dijelaskan secara garis besar adalah tentang kelembagaan politik yang diharapkan oleh Hasan Al Banna adalah kelembagaan politik yang mampu menjadi kontrol berjalannya pemerintahan dan sebagai sarana partisipasi politik bagi masyarakat. Konsep kelembagaan politik ini merupakan salah satu sarana dan strategi yang

---

<sup>14</sup>Anwar al-Junndi, *Biografi Hasan al-Banna*. Terjemahan, Khalifaturrahman Fath (Solo : Media Insani Press 2003), h. 72.

<sup>15</sup>Musthofa Muhammad Thahan, *Pemikiran Moderat Hasan al-Banna* (Bandung : Harakatuna. 2007), h. 83.

dibuat Hasan Al Banna untuk mengembalikan perwujudan pemerintahan Islam di dunia. Hasil penelitian ini memberikan gambaran kelembagaan politik yang efektif dalam penyelenggaraann negara serta dapat dijadikan alternatif kelembagaan bagi negara yang sedang mencari format ideal.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian pada Tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian penulis menggambarkan bagaimana konsep pemikiran politik berbeda dengan kelembagaan politik yang terdapat pada tesis ini, kemudian perbedaan yang lain adalah penelitian yang penulis lakukan menggambarkan sejauh mana pengaruh dari pemikiran politik Hasan al-Banna ini terhadap pergerakan ideologi yang berkembang ditengah-tengah ideologi partai politik di mesir pada saat ini.

Penelitian lain adalah skripsi yang berjudul *Hasan al-Banna, Pemikiran Dakwah, dan Jihadnya*, yang ditulis oleh Khomsul Laila mahasiswa Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selesai ditulis pada Tahun1998 dalam Skripsi ini mejelaskan lebih detail mengenai konsep dakwah Hasan al-Banna yang ia gunakan untuk menyi'arkan Islam lebih jauh lagi, ada lima prinsip yang dimiliki Ikhwanul Muslimin salah satunya adalah jihad yang juga diterangkan dalam skripsi ini, serta bagaimana perjalanan jihad Ikhwanul Muslimin.<sup>17</sup>

Adapun penelitian yang penulis ungkap adalah pemikiran politik dan perjalanan politik Hasan al-Banna serta pengaruh yang telah terjadi pada masyarakat dan tindakan yang di lakukan terhadap Ikhwanul Muslimin, yang pada masa itu masih dipimpin oleh Hasan al-Banna, kemudian penelitian yang penulis lakukan juga menggambarkan bagaimana pengaruh politik Hasan al-Banna di Mesir.

Penelitian lain yang membicarakan Hasan al-Banna adalah skripsi yang berjudul *Pemikiran Politik Hasan Al-Banna Dan Pengaruhnya Terhadap Mesir Tahun 1928 -1949 M.* yang ditulis oleh Mahfud Ihsanuddin pada Tahun 2009,

---

<sup>16</sup>Safrudin, *Pemikiran Politik Hasan Al Banna (Studi Tentang Konsep Kelembagaan Politik Menurut Hasan Al Banna)*, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2011).

<sup>17</sup>Khomsul Laila, *Hasan al-Banna, Pemikiran Dakwah, dan Jihadnya* (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998).

mahasiswa Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam Skripsinya penulis menceritakan tentang bagaimana awal mula lahirnya Hasan al-Banna yang kemudian menjadi panutan dari segi politik pada saat itu sehingga pemikiran politiknya yang bercita-cita mulia diterima oleh masyarakat mesir pada saat itu.

Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian penulis menggambarkan pengaruh ideologi politik Hasan al-Banna terhadap pergerakan partai politik di mesir artinya penelitian ini secara signifikan berbeda dari kurun tahunnya dan masanya.

## **H. Metode Penelitian**

### *1. Pendekatan*

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, khususnya penelitian biografi yang meneliti pemikiran seorang tokoh, yang dalam hal ini Hasan al-Banna, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*historical approach*).

Pada saat yang sama penelitian ini menhyelidiki pengaruh pemikiran seorang tokoh di tengah masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemikiran atgau (*philosophical approach*).

Namun, mengingat keterbatasan waktu dan dana, maka pengumpulan data yang digunakan adalah library method (metode kepustakaan), dimana pengaruh tersebut dipelajari melalui buku-buku dan dokumen Ihkwânul Muslimin.

Data-data byang diteliti adalah pemikiran tokoh, sehingga penelitian ini pada saat yang sama dilakukan sebagai penelitian atau studi tokoh, yang mengkaji secara secara kritis pemikiran seorang tokoh dan pengaruh pemikiran tersebut di tengah masyarakat,<sup>18</sup>

### *2. Sumber Data*

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data penelitiannya diperoleh dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari karya Hasan al-Banna sebagai tokoh yang diteliti, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>18</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 57.

Sumber data yang dimaksud baik dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab karya-karya Hasan al-Banna, terutama *al-Majmû' ar-Rasâil Hasan al-Banna*, dan buku-buku karya Hasan al-Banna yang lain yang berkaitan dengan masalah politik dan kemasyarakatan..

Sumber data sekunder atau pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang membahas pemikiran Hasan al-Banna, atau literature-literatur lain yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam atau pengaruh pemikiran tokoh terhadap perkembangan masyarakat.

### 3. *Instrumen Pengumpulan Data*

Menurut Syahrin Harahap, pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan, meliputi tiga hal :

- a. Dikumpulkan karya tokoh yang bersangkutan mengenai topik yang sedang diteliti (sebagai data primer). Dalam penelitian ini karya tokoh yang dimaksud yaitu kitab *al-majmu' ar-Rasail Hasan al-Banna*
- b. Ditelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti (sebagai data sekunder). Yang disebut terakhir bisa dicari dalam ensiklopedi, buku sistematis, dan tematis. Sebab dalam buku itu biasanya ditunjukkan pustaka yang lebih luas.

### 4. *Metode Analisis Data*

Adapun metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah:

- a. *Metode Deskriptif*, yaitu usaha untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

- b. *Metode Interpretatif*, dimaksudkan sebagai upaya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikan dalam, sekaligus mengkritisi isi kitab.
- c. *Metode Deduksi dan Induksi*. Dalam pengambilan keputusan digunakan metode *deduksi*, yaitu mengambil kesimpulan umum dari data-data yang bersifat khusus. Juga digunakan metode *induksi*, mengambil kesimpulan khusus dari data-data yang bersifat umum.

## **I. Sistematika Penulisan Laporan**

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan, sehubungan dengan itu diperlukan pembahasan yang di kelompokkan menjadi beberapa bab, sehingga mudah dipahami.

Pada Bab I penelitian ini : berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara terinci seluruh rangkaian rencana penelitian yang sudah terlaksana, dalam bab ini berisi terdiri latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II penelitian ini : menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Hasan Al-Banna baik latar belakang Internal seperti Biografi hasan al-banna, Pendidikan, Keluarga, kemudian membahas pemikiran Hasan Al-Banna tentang bagaimana Pendekatan Islam dan politik. Begitu juga dalam bab ini juga menceritakan tentang Latar Belakang Eksternal seperti Politik Pemerintahan, Keadaan Sosial masyarakat dan Persatuan ummat dan dalam bab ini juga ditekankan tentang perkembangan Ideologi politik di Mesir pasca Hasan Al-Banna.

Pada Bab III penelitian ini : merupakan penjelasan tentang pemikiran politik Hasan al-Banna yang berupa ideologi, dan beberapa kebijakan politik, seperti politik dalam negeri, politik luar negeri, penghapusan sistem multi partai yang kemudian menjadi sistem partai, dan perang Palestina. Dalam Bab ini juga



menerangkan perjalanan Ikhwanul Muslimin pada masa Hasan al-Banna dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ikhwanul Muslimin.

Pada Bab IV penelitian ini :: berisikan tentang pemikiran politik Hasan al-Banna yang berpengaruh pada kehidupan sosial dan politik masyarakat, respon dan tindakan pemerintah dalam menanggapi hal ini juga dibahas dalam bab ini. Penilaian dunia luar juga menjadi bahasan dalam bab ini dengan adanya kebijakan yang di keluarkan Ikhwanul Muslimin.

Pada Bab V penelitian ini : berisikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan daftar riwayat hidup penulis.

## BAB II

### LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

#### A. Latar Belakang Internal

##### 1. Geneologi Intelektual Hasan Al-Banna

Hasan al-Banna lahir di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir pada hari Minggu, 14 Oktober 1906 M., yang bertepatan dengan 25 Sya'ban 1324 H., Nama lengkap beliau, Hasan ibn Ahmad ibn 'Abdurrahman al-Banna. Ia berasal dari keluarga pedesaan kelas menengah.

Hasan Al-Banna merupakan pribadi berkharisma yang dikenal cerdas, taat dalam beribadah, mulia, dan berpengaruh dalam bentangan sejarah, baik di dataran Arab khususnya, dunia Islam umumnya, termasuk dunia Barat.<sup>19</sup> Ia pejuang yang memperjuangkan Islam sesuai dengan Alquran dan Sunnah sampai titik darah penghabisan. Banyak kalangan menilai bahwa beliau dibunuh oleh penembak misterius yang diyakini sebagai penembak "titipan" pemerintah pada 12 Februari 1949 M., di Kairo Mesir. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang luwes dalam berdakwah. Wilayah dakwah beliau bukan hanya di kalangan intelektual, tetapi di kalangan masyarakat yang berpengetahuan rendah sekalipun. Ia sering berdakwah di warung-warung kopi sambil berkumpul dengan masyarakat selepas lelah bekerja seharian. Dimana dengan metode dan cara beliau seperti itulah, efektifitas dakwah berjalan.<sup>20</sup>

Hasan al-Banna menyelesaikan pendidikan dasarnya di Mahmudiyah. Di tahun ketujuh dalam usianya, lelaki yang selalu meraih rangking pertama dalam semua jenjang sekolahnya ini, menyelesaikan hafalan separuh Alquran, kemudian menyempurnakan hafalannya di sekolah diniyah al-Rasyad. Setelah itu, melanjutkan ke sekolah *Mu'allimin Awwaliyah* di Damanhur, dan menamatkan pendidikan tingginya di Darul Ulum (1923-1927 M).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Khozin Abu Faqih, Bersama 6 Mursyid 'Am: Mengenal Perintis Kebangkitan Islam Abad 15 H, (Solo: Auliya Press, 2006), h. 17.

<sup>20</sup>Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna, Gerakan Ihwanul Muslimin dari Sayyid Quthub Sampai Rasyid Al-Ghanusyi*, (Jakarta: Harakah, 2002), cet. ke-2, h. 3.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 8.

Pada 1927 M., setelah menamatkan pendidikan tinggi di Dār al-‘Ulūm, al-Banna menjadi guru Sekolah Dasar di Ismailiyah selama sembilan belas tahun. Di tahun 1946 M., ia berpindah ke Kairo, kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai guru negeri. Setelah itu, al-Banna berkonsentrasi pada surat kabar harian *al-Ikhwān al-Muslimīn*.<sup>22</sup>

Lelaki yang aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan ini mempunyai perpustakaan besar. Di dalam perpustakaan ini berisi ribuan kitab dalam berbagai disiplin ilmu dan empat belas majalah berkala yang terbit di Mesir. *Al-Muqtathaf*, *al-Fath*, dan *al-Manar*, adalah beberapa majalah yang ada di perpustakaan tersebut. Hingga sekarang, perpustakaan ini masih tetap berdiri, dan dikelola oleh putranya bernama Saiful Islam.

Beliau sangat aktif menulis di berbagai majalah, diantaranya tabloid mingguan *Al-Ikhwān al-Muslimīn*, dimana pada tabloid ini beliau menulis dua macam artikel, berupa tema ilmu agama seperti tafsir, akidah, fiqh, fatwa, tasawwuf, akhlak, dan ceramah. Yang lainnya berupa tema-tema umum, seputar masalah sosial, politik, dan etika.

Hasan al-Banna merupakan pendiri organisasi besar, *Ikhwān al-Muslimīn*. Gerakan ini dibentuk pada bulan Dzulqā’dah 1347 H/ 1928 M., di kota Ismailiyah. Gerakan ini tumbuh dengan pesat dan tersebar di berbagai kelompok masyarakat. Sebelum mendirikan *Ikhwān*, al-Banna juga ikut mendirikan sebuah jamaah sufi bernama *Thariqah Hashafiyah* dan *Jamaah Syubban al-Muslimīn*. Metode gerakan yang diserukan oleh *Ikhwān* adalah bertumpu pada tarbiyah (pendidikan) secara bertahap.<sup>23</sup> Tahapan tersebut adalah dengan membentuk pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, pemerintah muslim, Negara Islam, Khalifah Islam dan akhirnya menjadi *Ustadziyatul ‘Alam* (kepeloporan dunia).

Pribadi Hasan al-Banna menarik banyak kalangan. Abul Hasan Ali an-Nadwi, memberikan kesaksian tentang al-Banna: “Pribadi itu telah mengejutkan Mesir, dunia Arab dan dunia Islam dengan gegap gempita dakwah, kaderisasi,

---

<sup>22</sup>Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna, Gerakan Ihwanul Muslimin dari Sayyid Quthub Sampai Rasyid Al-Ghanusyī*, (Jakarta: Harakah, 2002), cet. ke-2, h. 10.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 13.

serta jihad dengan kekuatannya yang ajaib. Dalam pribadi itu, Allah Swt., telah memadukan antara potensi dan bakat yang sepintas tampak saling bertentangan di mata para psikolog, sejarawan, dan pengamat sosial. Di dalamnya terdapat pemikiran yang brilian, daya nalar yang terang menyala, perasaan yang bergelora, hati yang penuh limpahan berkah, jiwa yang dinamis nan cemerlang, dan lidah yang tajam lagi berkesan. Di situ ada kezuhudan dan kesahajaan, kesungguhan dan ketinggian cita dalam menyebarkan pemikiran dan dakwah, jiwa dinamis yang sarat dengan cita-cita, dan semangat yang senantiasa membara. Di situ juga ada pandangan yang jauh ke depan”<sup>24</sup>

## 2. Pendidikan

Hasan al-Banna berasal dari keluarga agamis, terhormat, berpendidikan, kaya tetapi tidak menjadikannya lupa diri. Latar belakang keluarga yang agamis dan terdidik mempunyai pengaruh besar kepada kepribadian Hasan al-Banna di kemudian hari dalam berpola pikir dan intelektualitasnya. Beliau mendapat pendidikan dari orang tuanya, hidup dalam koridor keislaman berkat dukungan dan pola pendidikan yang dilakukan oleh ayahnya di rumah, berbagai disiplin ilmu telah dikuasai oleh Hasan al-Banna. Ayah kandungnya adalah al-Mukhlis syaikh Ahmad Abdurrahman al-Banna, seorang ulama yang diakui keilmuannya oleh ulama lain. Disamping itu, beliau bekerja sebagai tukang reparasi jam dan penjiilidan buku, sehingga ayahnya lebih terkenal dengan panggilan *as-Sā’ati* (tukang reparasi jam). Selain itu, Ahmad juga menulis sebuah kitab berjudul *al-Fath al-Rabbānī fī Tartīb Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibān*.<sup>25</sup>

Sedangkan ibunda dari Hasan al-Banna bernama Ummu Sa’d Ibrahim Saqr. Ibundanya adalah tipologi wanita yang cerdas, disiplin, cerdik dan kokoh pendirian. Apabila telah memutuskan sesuatu sulit bagi Ummu Sa’d untuk menarik mundur keputusannya. Ini senada dengan sebuah pepatah yang berbunyi, “Jika layar terkembang pantang biduk surut ke pantai.” Perhatiannya pada

---

<sup>24</sup>Hasan al-Banna, *Majmū’ah al-Rasā’il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, “Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I, cet. 15, (Solo: Era Intermedia, 2008), h.21.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 28.

pendidikan membuatnya juga bertekad untuk menyekolahkan Hasan al-Banna hingga ke pendidikan tinggi. Ummu Sa'ad memiliki delapan delapan orang anak, yang masing-masing adalah: Hasan al-Banna, Abdurrahman, Fatimah, Muhammad, Abdul Basith, Zainab, Ahmad Jamaluddin, dan Fauziyah.

Hasan al-Banna menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Mahmudiyah*. Di tahun ketujuh dalam usianya, lelaki yang selalu meraih ranking pertama dalam semua jenjang sekolahnya ini, menyelesaikan hafalan separuh Alquran, kemudian menyempurnakan hafalannya di sekolah *diniyah al-Rasyad*. Setelah itu, melanjutkan ke sekolah *Mu'allimin Awwaliyah* di Damanhur, dan menyelesaikan pendidikan tingginya di Darul Ulum (1923-1927).

Pada tahun 1927, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di Dār al-'Ulūm, al-Banna menjadi guru Sekolah Dasar di Ismailiyah selama sembilan belas tahun. Di tahun 1946, ia berpindah ke Kairo, kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai guru negeri. Setelah itu, al-Banna berkonsentrasi pada surat kabar harian *al-Ikhwan al-Muslimin*.

Lelaki yang aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan ini mempunyai perpustakaan besar. Di dalam perpustakaan ini berisi ribuan kitab dalam berbagai disiplin ilmu dan empat belas majalah berkala yang terbit di Mesir. *Al-Muqtathaf*, *al-Fath*, dan *al-Manar*, adalah beberapa majalah yang ada di perpustakaan tersebut. Hingga sekarang, perpustakaan ini masih tetap berdiri, dan dikelola oleh putranya bernama Saiful Islam.

Beliau sangat aktif menulis di berbagai majalah, diantaranya tabloid mingguan *Al-Ikhwan al-Muslimin*, dimana pada tabloid ini beliau menulis dua macam artikel, berupa tema ilmu agama seperti tafsir, akidah, fiqh, fatwa, tasawwuf, akhlak, dan ceramah. Yang lainnya berupa tema-tema umum, seputar masalah sosial, politik, dan etika.

Kemudian majalah *al-Nadzir*, yang juga diterbitkan Ikhwanul Muslimin setelah tabloid *al-Ikhwan al-Muslimin*. Majalah ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarkan fikrah, harakah, dan pemahaman bagi anggota Ikhwan. Sisi perhatiannya lebih kepada kajian sosial politik. Selanjutnya majalah *al-Manar* yang diterbitkan Rasyid Ridha pada 15 Maret 1898.

Hasan al-Banna diminta untuk menulis tentang tafsir Alquran oleh keluarga Rasyid Ridha setelah kewafatan pendirinya tersebut. Beliau juga aktif menulis di majalah *al-Ta'aruf*, dimana al-Banna menulis dalam rubrik fiqh dan politik.<sup>26</sup>

Dari latar belakang pendidikannya, tidaklah mengherankan jika beliau tampil sebagai sosok da'i, pejuang, propagandis dan politikus yang gigih dalam memperjuangkan cita-citanya. Perpaduan antara semangat Islam dan bakat memimpin yang dimilikinya, tampak jelas ketika masih muda belia, yang cenderung berserikat dan mengorganisasi massa. Keterpaduan moral dan intelektual pada dirinya menjadikannya sebagai orang yang berkepribadian luhur, karismatik sehingga kepribadian tersebut benar-benar dapat menyatu sekaligus mempengaruhi para pengikutnya.

### 3. Keluarga

Syaikh Abdurrahman Al Banna, kakek Hasan Al-Banna adalah seorang pembesar sekaligus konglomerat desa Syamsyirah. Dia memiliki dua anak laki-laki, Ahmad dan Muhammad. Ahmad menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu di Al Azhar, sedangkan Muhammad bekerja di desa. Ketika Abdurrahman Al Banna meninggal, keduanya berselisih tentang warisan. Ahmad mengalah dan meninggalkan desa untuk menetap di Mahmudiyah.

Syaikh Ahmad (ayah Hasan Al Banna) bekerja sehari-hari sebagai tukang reparasi jam dan sisa waktunya dimanfaatkan untuk mengajar fiqih, tauhid, serta hafalan Alquran berikut tajwid. Ia memiliki perpustakaan yang dipenuhi beragam buku ilmu-ilmu Islam. Ketika penduduk Mahmudiyah membangun masjid, mereka meminta agar syaikh Ahmad mengawali khutbah jum'at di masjid tersebut. Saat itu penduduk Mahmudiyah sangat kagum dengan keilmuan dan retorika bicaranya, sehingga ia diminta menjadi khatib dan imam masjid setempat.

Ia membagi waktu antara mengajar dan memperbaiki jam. Syaikh Ahmad mengajar fiqih empat madzhab dan kitab-kitab *sunan*.

---

<sup>26</sup>Hasan al-Banna, *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, "Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I, cet. 15, (Solo: Era Intermedia, 2008), h. 32.

Ia mengajar kitab *Al Muwatha'* Imam Malik, *Musnad* Imam Syafi'i, serta menyusun beberapa buku, antara lain *Bada'i'u al Minan fi jam'i wa tartib Musnad alSyafi'i wa al sunan*, sekaligus memberi *tahqiq* dan *syarah* nya. Ia juga menyusun satu juz di antara kitab empat Imam *Musnad*, juga menyusun *Musnad* Imam Ahmad dengan judul *Fath al Rabbany fi Tartib Musnad al Imam Ahmad alSyaibany*. Syaikh Ahmad menikah dengan seorang wanita dari keluarga Abu Qaura dan dikaruniai lima anak laki-laki dan dua anak perempuan, Hasan Al Banna merupakan anak sulung.<sup>27</sup>

Hasan Al Banna lahir dari keluarga yang cukup terhormat dan dibesarkan dalam suasana keluarga Islam yang taat. Sebagai seorang ayah, Syaikh Ahmad mencita-citakan putranya (Hasan) sebagai *mujahid* (pejuang) disamping seorang *mujaddid* (pembaharu).<sup>28</sup>

#### 4. Pendekatan yang Digunakan dalam Mengkaji Islam dan politik

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu *siyasa*, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau *siyasa* dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.<sup>29</sup> Sejak Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna kondisi Mesir dan dunia Arab berada dalam lingkungan pemikiran Barat. Para tokoh sekuler hanya membatasi aktivitas agama sebatas dinding masjid dan menjadi urusan pribadi. Padahal pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abbas Assisi, *Biografi Dakwah Hasan Al Banna*, terj. NandangBurhanudin, (Bandung: Harokatuna Publishing, 2006), h. 382-383.

<sup>28</sup> Richard Paul Mitchell, *Masyarakat Al Ikhwanul Muslimun: Gerakan Da'wah Ikhwan di Mata Cendekiawan Barat*, terj. Safrudin Edi Wibowo, hlm. 4.

<sup>29</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4-6.

<sup>30</sup> Musthafa Muhammad Thahan, *Pemikiran Muderat Hasan Al-Banna*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), h. 11.

Pandangan Hasan Al-Banna terhadap konsepsi politik adalah, ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dan politik dan sikap seorang mukmin terhadapnya. Mengutip pernyataan Hasan Al-Banna mengenai pendapatnya tentang politik “Tidak seorang pun berbicara kepada anda tentang politik dan Islam kecuali anda dapati bahwa ada pemisahan antara keduanya sejauh-jauhnya, mereka memberi pemahaman kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah sesuatu, sedangkan masyarakat adalah sesuatu yang lain, Islam adalah sesuatu sedangkan kebudayaan adalah sesuatu yang lain, dan Islam harus berada jauh dari politik”.

Katakanlah kepadaku, wahai saudaraku semua, jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, bukan pula budaya, lalu apa ? apakah ia adalah beberapa bilangan rakaat yang sepi dari kehadiran hati ini ? ataukah ia adalah beberapa ungkapan seperti yang pernah dikatakan oleh Rabi’ah Al-‘Adawiyah, *istighfar* yang membutuhkan *istighfar* ? Hanya untuk inilah, wahai saudaraku?, Alquran diturunkan sebagai sistem yang pasti, terperinci dan sempurna?<sup>31</sup>

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah *Fathu Makkah* (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa “Politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat”.<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian

---

<sup>31</sup>Hasan Al-Banna, *Risalah Ikhwanul Muslimin Jilid I*, h. 66.

<sup>32</sup>Utsman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 72.



mereka menyimpang, Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah “menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran-sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturannya ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.”<sup>33</sup>

Hasan Al-Banna mengaitkan aqidah dengan aktivitas politik, “Ia berkata sesungguhnya seorang muslim belum sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi seorang politikus, yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan memberikan perhatian yang penuh terhadap persoalan bangsanya. Keislaman seseorang menuntunnya untuk memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsanya”.

Selanjutnya Hasan Al-Banna mengatakan “Sesungguhnya kami adalah politikus dalam arti kami memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan bangsa kami, dan kami bekerja dalam rangka mewujudkan kebebasan seutuhnya”. Karenanya, menurut Ikhwan Muslimin, politik adalah upaya memikirkan persoalan internal dan eksternal umat, memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya. Ia berkaitan dengan aqidah dan akhlak serta bertujuan untuk melakukan perubahan. Definisi ini sesuai dengan kondisi Mesir, khususnya pada masa-masa pendudukan asing. Karena memberikan motivasi internal kepada individu untuk melakukan aktivitas politik dalam permikiran, perhatian dan usaha dalam mengubah kondisi umat serta menjadikan politik sebagai masalah yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Gagasan Hasan Al-Banna tentang Islam dan politik berbeda dari tokoh politik sebelumnya, Hasan Al-Banna membuat terobosan baru, yaitu dengan menjadikan isu ekonomi dan isu sosial sebagai bagian dari program pergerakan Ikhwanul Muslimin. Isu itu menjadi bagian dari pembicaraan publik Mesir terutama ketika pengaruh

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 72-73.

sosialisme semakin besar. Secara gamblang konsep pokok yang dipahami Hasan Al-Banna tentang lingkup dari ajaran Islam dapat dilihat dalam *risalah ta'lim*, risalah yang ditujukan khusus kepada mujahidin Ikhwanul Muslimin sebagai suatu perintah yang harus diamalkan, pada rukun *bai'at* kesatu tentang *al-Fahmu* (pemahaman) yang memuat tentang *Ushul 'Isyrin* (dua puluh pokok pemahaman Islam) yang wajib dipahami oleh anggota Ikhwanul Muslimin, pasal 1 yang berbunyi :

Islam adalah sistem yang syamil (menyeluruh), mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka ia adalah negara dan tanah air atau pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang, atau ilmu pengetahuan dan hukum, materi dan kekayaan alam atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah atau pasukan dan pemikiran. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan benar, tidak kurang tidak lebih”<sup>34</sup>

Bila dilihat dari pengertian itu, maka menjadi jelas bahwa ruang lingkup Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan Negara, sebagaimana dalam Alquran dijelaskan :

يَا أَضْطَرُّ فَمَنْ دِينًا إِلَّا سَلِمَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَّتْ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنَّ لِي تَمَّتْ جَانِبِي غَيْرَ مَخْمَصَةٍ وَ

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuidhai Islam itu Jadi agama bagimu (QS. Al-Maidah : 3).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kesempurnaan agama islam yang mengatur segala lini kehidupan manusia tidak terbatas soal ibadah saja hal ini juga terkait dengan aturan dalam Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang

<sup>34</sup>Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid II*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2005) h. 162-163.

memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan.

## **B. Latar Belakang Eksternal**

### *1. Situasi Politik Pemerintahan*

Politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan dalam masyarakat, membahas soal-soal yang berkenaan dengan masalah, bagaimana sebuah pemerintah dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar terwujud masyarakat atau negara yang paling baik. Dengan demikian, politik itu mengandung berbagai unsur-unsur aktivitas pemerintah, masyarakat, dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan dalam negara.<sup>35</sup>

Politik pada umumnya merupakan bagian yang sangat penting, di mana manusia mendambakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih kondusif bagi peningkatan martabat dan hak-hak asasi manusia. Ini, tentunya ada pada setiap negara. Suatu kewajiban apabila antara negara yang satu dengan negara yang lain mempunyai tujuan yang berbeda. Karena setiap komunitas, apalagi komunitas besar pasti mempunyai pemikiran dan tujuan yang tidak sama. Secara teori, politik Islam merupakan suatu kegiatan politik yang sangat terkait dengan landasan, dimensi-dimensi dan nilai-nilai yang berdasarkan pada ajaran dan syari'at Islam. Artinya hubungan manusia dengan kekuasaan atau berbagai kepentingan manusia yang diilham dengan petunjuk-petunjuk Islam yang bersumber pada Alquran .<sup>36</sup> Karena pada prinsipnya Islam adalah agama yang tujuan utamanya menegakkan dan membangkitkan kembali paham tauhid dengan segala kemurnian yang bersumber pada Alquran dan sunnah.<sup>37</sup>

Sistem yang berlaku di Mesir waktu di bawah raja Faruk, menganut system monarchi atau kerajaan. Dalam sistem ini, kepala negara ditentukan melalui garis keturunan tanpa musyawarah. Hasan Al-Banna menyatakan bahwa awal penyakit masyarakat adalah adanya penyimpangan umat dari cita-cita Islam

---

<sup>35</sup> Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qu'ran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

<sup>36</sup> Abdul Aziz, *Politik Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 17.

<sup>37</sup> Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Pensil, 2004), 56.

semula yaitu masa Nabi Muhammad Saw. Karena dalam Islam, hanya mengakui kepemimpinan umat yang didasarkan pada *bay'ah* dan *syura*, dan Islam tidak mengakui kepemimpinan yang didasarkan melalui garis keturunan.<sup>38</sup>

Hasan Al-Banna sangat prihatin, setelah melihat akibat negatif pengaruh modernisasi sekuler Barat pada kehidupan dan nilai-nilai Islam serta kelemahan pemerintah yang dirasa kurang tanggap dalam menghadapi kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat Mesir. Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam tidak dalam kapasitasnya yang saling kerja sama, akan tetapi selalu memojokkan dan memusuhi umat Islam. Sehingga ditegaskannya sifat politik Islam dan perlunya aksi politik, guna melaksanakan dan mendirikan pemerintahan Islami dengan mempunyai keyakinan pada syari'at Islam yang utuh.<sup>39</sup>

Dengan melihat kondisi Mesir seperti itu, Hasan Al-Banna ingin menegakkan dan menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, Hasan Al-Banna tidak mempunyai niat untuk melakukan kudeta dengan merubah bentuk pemerintahan yang ada, ia hanya ingin menjadikan syari'at Islam menjadi hukum dalam negara. Untuk mencapai tujuannya, pemilu tahun 1942 menjadi awal peluang Hasan Al-Banna untuk ikut mencalonkan diri agar menjadi anggota parlemen. Keikutsertaan Hasan Al-Banna dalam pemilu kali ini merupakan jawaban atas kebutuhan praktis, demi kepentingan dakwah.<sup>40</sup>

Dalam bidang agama dan politik, Banna menegaskan bahwa prinsip Islam dapat diterakan pada keyakinan yang banyak dianut dalam soal politik dan lembaga politik. Menurutnya, Islam memerlukan suatu pemerintah yang mencegah anarki, namun tidak menetapkan bentuk pemerintah tertentu. Islam hanya meletakkan prinsip pokok yaitu, penguasa bertanggungjawab kepada Allah dan rakyat. Bahkan dianggap sebagai abdi rakyat, selain itu kaum muslim harus bersatu karena persaudaraan muslim merupakan prinsip iman dan kaum muslim harus memonitor tindakan penguasa, menasehati penguasa, dan mengupayakan agar kehendak bangsa dihormati. Karena ketiganya merupakan prinsip yang sangat luas, maka negara Islam bisa memiliki banyak bentuk termasuk demokrasi

---

<sup>38</sup>Hasan Hanafi, *Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 134.

<sup>39</sup>John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 11.

<sup>40</sup>Fathi Yakan, *Revolusi Hasan Al-Banna* (Jakarta: Harakah, 2002), h. 42.

parlementer konstitusional. Untuk tujuan jangka panjang, Banna lebih tertarik pada sistem kekhalifahan.

Banna menyebutkan bahwa pemerintahan konstitusional merupakan sistem paling dekat dengan pemerintahan Islam, termasuk konstitusi 1923 Mesir adalah sah karena menegaskan bahwa semua undang-undang harus selaras dengan prinsip Islam. Akan tetapi di sisi lain, konstitusi itu perlu diamandemen untuk menjamin penerapan hukum Islam, misalnya tidak adanya larangan yang tegas tentang konsumsi alkohol, prostitusi, judi, dan riba.

Soal pemilu, Banna berpendapat bahwa pemilu dapat menjamin kehendak bangsa. Namun system pemilu Mesir perlu diperbaharui. Pemilu 1923 dan 1930 telah gagal memilih orang-orang yang representatif dari elit Mesir. Banna mengusulkan agar yang jadi calon hanya orang yang ahli dalam hukum agama dan urusan publik dan hanya pemimpin alamiah masyarakat yaitu, kepala suku, keluarga dan organisasi.

Sayyid Qutb juga tidak setuju dengan sistem pemerintahan yang berlaku, Ketika itu Mesir dipimpin oleh presiden Jamal Abdul Naser. Dalam pandangan Qutb Sistem yang berlaku pada pemerintahan masa itu berseberangan dengan ajaran dan syari'at Islam yang sebenarnya, Sehingga Qutb meletakkan ide-ide berupa keinginan untuk menerapkan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan ia ingin menjadikan syari'at Islam menjadi konstitusi (UUD) negara. Akan tetapi untuk menerapkan idenya itu, Sayyid Qutb tidak pernah ikut pemilu yang pernah ada di Mesir.<sup>41</sup>

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya munculnya pemikiran tentang penerapan syari'at Islam disebabkan adanya kemunduran dan kerapuhan dunia Islam dan adanya rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik. Sehingga wilayah dunia Islam berakhir dengan dominasi kebudayaan dan penjajahan Barat. Pada dasarnya pemikiran tentang penerapan syari'at Islam yang digagas oleh Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, tidak terlepas dengan adanya organisasi IM (Ikhwanul Muslimin) yang didirikan tahun 1928. Adanya Ikhwanul Muslimin merupakan respon terhadap perkembangan yang

---

<sup>41</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 146.

terjadi di dunia Islam khususnya Timur Tengah dengan makin luasnya dominasi imperialisme Barat.<sup>42</sup>

Organisasi ini didirikan dan dikembangkan oleh dua tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangannya. Dengan demikian Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb menjadi penggerak Ikhwanul Muslimin di bidang pembaharuan, dengan tujuan utamanya untuk melakukan perubahan radikal dari sistem sosial-politik yang sekuler ke arah ketentuan-ketentuan Islam yang lebih baik. Lahirnya gerakan radikal ini adalah sebagai respon untuk melawan Barat yang hegemonik dan terlalu ikut campur terhadap negara-negara Islam. Sehingga dengan cara apapun mereka mendeklarasikan perlawanannya terhadap Barat.<sup>43</sup>

## 2. *Kondisi Sosial Masyarakat*

Realitas sosial masyarakat Mesir ini tidak luput dari pengamatan al-Banna. Maka alternatif pemecahannya tidak kalah pentingnya adalah ide dan gerakan pembaruan al-Banna. Masyarakat Mesir ketika itu hidup dalam kemiskinan sebagai akibat dari monopoli Inggris. Konsekuensi lain dari pendudukan Inggris adalah kobodohan, rendahnya tingkat kesehatan dan dekadensi moral. Berhadapan dengan realitas sosial yang sedemikian rupa, maka sangat tepat jika al-Banna melontarkan gagasan perlunya dilakukan kegiatan ekonomi bersama dan penghapusan dominasi minoritas dalam perekonomian. Dengan gagasan ini, kelihatannya al-Banna ingin melakukan aktifitas sosial pada pemerataan keadilan. Gagasannya di bidang sosial lainnya adalah pengadaan sarana kesehatan, rumah penampungan, poliklinik, pemberian makan kepada fakir miskin dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur

Masyarakat Mesir pada saat itu terdiri dari berbagai komponen. *Pertama*, golongan tuan tanah dan para pemilik real estate di kota-kota. Pada periode antara tahun 1919 hingga tahun 1952 dengan persentase 0,5 % dari jumlah keseluruhan tuan tanah memiliki 33,9 % hingga 35,2 % tanah pertanian, yang mereka garap untuk menambah kekayaan mereka masing-masing. Kekayaan

---

<sup>42</sup>Endang Turmudi, dkk, *Islam dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: Lipi Press, 2005), h. 56.

<sup>43</sup>M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 13.

yang besar ini merupakan modal kekuasaan politik mereka. Masing-masing pemimpin partai dan para politikus berafiliasi kepada kelompok yang menikmati banyak fasilitas ini.

*Kedua*, Mayoritas rakyat, yang terdiri dari kaum tani, buruh-buruh pertanian, pekerja kasar dan sebagainya. Pada tahun 1945, jumlah penduduk pedesaan dan yang bekerja di sektor pertanian mendekati 12 juta jiwa, 70 % dari mereka tidak memiliki selain 13% tanah pertanian dan itu pun hanya sebanyak 5 *qirath* (1 *qirath* = 4/6 dinar) untuk tiap individu . satu juta diantara mereka adalah buruh tani nomaden tidak mempunyai apa-apa. Pada tahun 1946 buruh pertanian dan penduduk pedesaan mencapai 15 juta jiwa, dan apabila dirata-rata setiap individu mempunyai 1/5 acre ( 1 acre = 0,4646 Ha) persentase buruh dikota terus bertambah sehingga jumlah mereka mencapai 1 juta jiwa pada tahun 1948.

*Ketiga*, Mayoritas rakyat, itu mengalami kesengsaraan hidup, penyakit, tidak memperoleh pendidikan yang layak dan hanya dieksploitasi. Ini semua menunjukkan betapa rusaknya system social yang ada ketika itu, munculnya sitem kelas, dan tidak adanya keadilan social

*Keempat*, Kaum intelektual yang terdiri dari kaum professional, pegawai dan mahasiswa<sup>44</sup>

*Kelima*, Ikhwanul Muslimin tumbuh ditengah kaum buruh Isma'iliyyah. Kaum buruhlah yang mendesak Hasan Al-banna untuk membentuk sebuah organisasi yang berusaha membebaskan dari kezhaliman dan kesengsaraan yang dirasakan kaum buruh<sup>45</sup>

Dengan alasan itulah Ikhwanul Muslimin menjadikan salahsatu tujuan dalam kegiatannya adalah mewujudkan keadilan social dan jaminan social bagi setiap warga Negara, memberantas kebodohan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain. Dalam menghadapi persoalan keadilan social pertentangan kelas, Ikhwanul Muslimin menggunakan cara teorisasi pemikiran dan penyadaran, Ikhwanul Muslimin juga memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan tenaga kerja

---

<sup>44</sup>Hasan Al-Banna, *al-Risalah al-Mu'tamar as-Sadis*, h. 15-22.

<sup>45</sup>Muiz Ruslan, memoir hasan al-banna, untuk dakwah dan para dainya, (Surakarta : Era Intermedia, 2000), h. 26.

dan petani, sehingga Ikhwanul Muslimin mendirikan departemen tenaga kerja dan petani di kantor pusatnya.

### 3. Kondisi Persatuan Umat

Pemerintahan dalam Islam berdiri di atas beberapa prinsip, yang Menurut Hasan Al Banna disebut dengan struktur dasar sistem pemerintahan, yaitu tanggung jawab pemimpin, diantaranya adalah persatuan umat.

Kemudian yang dimaksud Hasan Al-Banna dengan kesatuan umat adalah, bahwa pemerintah dalam bertindak dan mengambil kebijakan haruslah menjaga kesatuan umat. Bukan justru diartikan sebagai semuanya harus mengikuti apapun kata penguasa. Karena dalam Islam justru terdapat praktek memberi nasihat *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Banna mengutip hadits Rasulullah .<sup>46</sup>

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ — رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Daari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Agama adalah nasihat.” Kami bertanya, “Untuk siapa?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya.” (HR. Muslim)<sup>47</sup>

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَالَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَفَتَلَهُ

Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang yang melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh.” (HR. Ath Thabarani)<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 299-300.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 302.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 303.



Dalam masalah-masalah yang pokok menurut Hasan Al-Banna, umat Islam tidak mempunyai perbedaan, sebab sistem sosial yang mendasarinya adalah satu pandangan, yakni Islam yang diakui oleh seluruh anggota masyarakat. Tetapi perbedaan dalam berbagai cabang yang tidak mendasar tidaklah penting, dan tidak mengharuskan adanya permusuhan, saling memaki dan bergolong-golongan. Akan tetapi harus diadakan pembahasan, pemecahan dengan musyawarah dan saling memberi nasihat. Sesuatu yang ada nashnya (hukumnya) tidak perlu diijtihadkan, sesuatu yang tidak bernash (belum ada ketentuan hukum), maka harus ditentukan oleh pemimpin untuk mempersatukan ummat.

#### *4. Situasi dan Perkembangan Politik di Mesir*

Sepanjang sejarah Islam, Mesir seringkali memperoleh posisi yang terpisah dari sentral kekuasaan dan selalu mendapatkan identitas regional. Semua itu tercermin pada kekuasaan khalifah dan masa Utsmaniyah, yaitu kedudukannya sebagai negara semi otonomi. Hal ini disebabkan pada letak geografisnya yang jauh dari pusat pemerintahan ibukota. Perasaan memiliki identitas yang terpisah inilah yang kemudian melahirkan Mesir sebagai garda depan perkembangan sosial, politik, intelektual, dan keagamaan di dunia Arab dan dunia Islam umumnya.

Mencermati kecenderungan ideologis yang berkembang di Mesir dalam wacana interaksinya dengan Barat setelah kemerdekaan, dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Tradisional Islam, yang dikawali oleh ulama konservatif dan pembela status quo
2. Nasionalisme sekuler, yang diwakili oleh birokrat, dan tokoh-tokoh militer yang telah mengalami westernisasi
3. Reformasi radikal Islami yang dicerminkan oleh kalangan menengah dan kelas menengah bawah yang juga telah mengalami modernisasi.

Pemetaan kecenderungan tersebut merupakan penyederhanaan dan tidak mencakup seluruh peta kekuatan sosial-politik di Mesir. Tetapi paling tidak dapat

menangkap arus ideologis yang muncul di Mesir pasca kolonialisme. Sejauh politik di Mesir telah terjadi evolusi pemikiran pembaharuan sejak pan-Islamisme, pan Arabisme nasionalisme lokal dan regionalisme. Dalam evolusi pembaharuan ini terlihat bahwa Islam mengalami proses periferialisme atau marginalisasi bahkan terlalu kompromistis terhadap Barat, sehingga tidak memiliki kedudukan signifikan dalam berbagai bentuk pembaharuan, khususnya di bidang politik.

Sementara pada sisi yang berbeda, muncul sikap politik yang secara konsisten menunjukkan upaya untuk merekonsiliasikan Islam dengan negara. Bahkan meyakini Islam memiliki kemampuan sebagai sebuah ideologi yang total dan komprehensif, sehingga kelembagaan Islam dalam bidang sosial-politik merupakan keharusan. Benturan dua visi politik yang berseberangan tersebut menimbulkan dinamika yang menarik tentang hubungan antara Islam dan politik, tantangannya pada negara dan dampaknya pada proses demokratisasi.

Maka wajar apabila Mesir pada era 1990-an memberikan contoh tentang progresivitas politik Islam kontemporer di dunia Arab dan dunia Islam pada umumnya. Dalam hal ini adalah pengalaman Mesir mengenai Islam revolusioner radikal yang dipresentasikan dengan baik oleh kaum radikal Islam gerakan Ikhwanul Muslimin.

### **C. Corak pemikiran politik Hasan Al-Banna**

Hasan al-Banna disebut-sebut sebagai *neo-salafie* dengan pemikiran tiga pandangan dasar yaitu:

1. Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri.
2. Islam memancar dari dua sumber fundamental yaitu Alquran dan Hadis.
3. Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat

Untuk mengembangkan konsep itu, Hasan al-Banna memulai langkahnya dengan konsep *tarbiyahnafsiyah* (pembinaan jiwa) dengan metode pendidikan *qur'ani* sembari bersandar juga secara kuat kepada kategorisasi al-Hadis. Hasan

al-Banna lebih mendukung status logis dari preposisi pendidikan dan sekaligus menyusun suatu perubahan moralitas Islam yang komprehensif. Karena menurutnya, sejarah panjang kehidupan manusia membuktikan betapa banyaknya generasi yang hancur akibat lemahnya pendidikan iman dan moral yang diberikan kepada anak.<sup>49</sup>

Dalam pandangan Hasan al-Banna, keutamaan Islam bagi umat manusia dengan memberikan metode yang tepat dan sempurna bagi pendidikan rohani, pendidikan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan *madaniyah*. Artinya bagaimana pembentukan generasi *rabbani* masa depan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan akhlak. Pembentukan generasi *rabbani* direduksi dari teks-teks Alquran dan al-Hadis memerlukan tanggungjawab mutlak yang satu sama lain mempunyai kaitan yang sangat erat.

Hasan Al-Banna membagi fase pembinaan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu

- 1) Fase pengenalan seluruh lapisan masyarakat,
- 2) Fase pembentukan kader (*marhalah al-takwin*) dari elemen pilihan yang sudah terkumpul, dibentuk regu-regu pejuang dakwah,
- 3) Fase realisasi (*marhalah al-tanfudz*) dengan melakukan gerakan (*harakah*) dakwa bersama-sama mewujudkan hukum Allah SWT di muka bumi.

Dalam bukunya *majmu'atu al-Rasail*, Hasan al-Banna memandang bahwa pada saat ini kebutuhan akan tafsir yang sesuai dengan tingkat pemahaman manusia dan kekuasaan berpikir mereka (*Q.S. al-Qamar: 17, al-Dukhan: 58, al-Fushilat:53*). Ia sangat menghargai tafsir *bi al-Ra'yi* yang selalu memelihara agar tafsir yang dibuat tidak dipahami dan dikuasai oleh tujuan-tujuan khusus, kepentingan pribadi. Termasuk dalam menafsirkan ayat-ayat politik.

Setelah memahami nilai-nilai pendidikan iman, sosialisasi dalam kehidupan, selanjutnya memahami nilai-nilai dasar Islam dalam Alquran dengan

---

<sup>49</sup>Muhammad Abdullah Al Khatib, *Muhammad Abdul Halim Hamid, "Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan : Kajian Analitik Terhadap Risalah Ta'lim"*, (Asy Syaamil Press & Grafika : Bandung, 2001), h. 114-118.

menafsirkan secara benar. Hasan al-Banna membuat konsep-konsep nilai pribadi dalam rumah tangga dalam tiga bagian fase tersebut. Karena menurutnya fondasi pemerintahan Islami berangkat dari fondasi keluarga. Kuatnya sebuah pemerintahan berangkat dari nilai-nilai dalam keluarga. Pemikiran Hasan al-Banna yang berkaitan dengan politik terbagi dalam 3 (tiga) kelompok pikiran yaitu :<sup>50</sup>

- 1) Reformasi sosial dengan asas akidah
- 2) Tidak adanya pemisahan agama dan negara
- 3) Syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam.

#### *1. Reformasi sosial dengan asas akidah*

Hasan Al-Banna menyakini benar bahwa sesungguhnya perubahan sosial dan perbaikannya harus dimulai dengan apa yang terdapat dalam diri. Dengan argumentasi *surat al-Ra'ad : 11* konsep ini menawarkan satu model perubahan sosial dengan fase yang disebutkan di atas bahwa perubahan pada fase awal terpusat dari pribadi. Selanjutnya perubahan pada keluarga, dan selanjutnya menuju kepada masyarakat secara *kaffah*. Perubahan dengan asas akidah ternyata memberikan implikasi yang luas, setidaknya dalam mempertahankan keimanan dan akhlak dalam kondisi negara dalam perubahan apapun. Asas ini ternyata dibuktikan dengan ketahanan Mesir dalam menghadapi modernisasi Barat pada masa hidupnya.<sup>51</sup>

#### *2. Tidak adanya pemisahan agama dan negara*

Bagi Hasan al-Banna, *Ulama'* tidak dapat berpisah dengan *Umara*. *Umara* sebagai pelaku utama dalam pemerintahan wajib berkolaborasi dengan ulama. Kuatnya suatu pemerintahan apabila peran ulama diposisikan pada kedudukan yang sesuai. Ulama menjadi tempat untuk mempertimbangkan semua kebijakan yang berkenaan dengan kemaslahatan umat Islam. Kehancuran sebuah

---

<sup>50</sup>Hasan Al banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, terjemahan : Anis Matta, Rofi Munawar Dan Wahid Ahmadi, (Solo : PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), h. 58-59.

<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 62-67.

pemerintahan menurutnya, karena ulama dimarjinalkan dalam posisi lemah dan hanya sebagai tameng sebuah keputusan.

### *3. Syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam*

Islam sebagai agama paripurna, mempunyai tataran nilai hukum yang wajib diikuti semua umat Islam. Oleh karena, kedudukan syariat Islam sebagai *dustur al-a'la* dalam pemerintahan Islam mutlak. Ide-ide cemerlang menjadi wacana dasar Ikhwanul Muslimin, dan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin dilakukan melalui ceramah rutin, menerbitkan majalah dan brosur atas eksistensi Islam dan pembaharuan, dan secara bertahap melakukan rekonstruksi organisasi tersebut. Oleh karenanya, gerakan awal al-Banna dan Ikhwanul Muslimin mulai membangkitkan kesadaran beragama bangsa Mesir saat itu; kesadaran kembali pada ajaran murni Islam; dan menumbuhkan spirit juang untuk satu pembebasan terutama dari ekspansi kerajaan Inggris.

### *4. Persamaan Hak Penuh*

Dalam berbagai tulisan Hasan al-Banna, dapat ditarik pandangan yang jelas tentang persamaan hak antara kaum muslimin dan non muslimin. Tokoh kharismatis pendiri Ikhwanul Muslimin membahasnya dalam tulisan *NahwanNuur* (menuju cahaya) yang pada dasarnya ditujukan pada penguasa dan pejabat tinggi Mesir selama kurang lebih setengah abad. Karya itu berjudul “*al-Islamu yahmiil al-Aqalliyyaati wa Yashuunu al-Huquqal al-Ajaanib*” (Islam menjaga kelompok minoritas dan memelihara hak-hak orang lain).

Dalam buku itu dinyatakan Islam menyucikan persatuan manusia secara universal. Kemudian mensucikan persatuan agama secara universal pula ketika terjadi fanatisme. Islam mengharuskan para pemeluknya untuk mengimani seluruh agama samawi. Kemudian Hasan al-Banna menegaskan, inilah yang Islam yang dibangun di atas sikap moderat dan kesadaran tinggi, tidak mungkin diikuti oleh pemecah belah persatuan yang terpadu ini. Namun sebaliknya, kesucian agama yang mampu mempersatukan manusia ini terkadang dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu.

Dalam tulisannya yang berjudul “*al-Musykilatunaa fi ad-Dhau’in-Nizhaam al-Islami*” (problematika kita dalam perspektif sistem Islam), Hasan al-Banna menyatakan dengan jelas “minoritas nonmuslim yang menjadi warga negara ini diajari kesempurnaan ilmu tentang bagaimana mencapai ketenangan hidup, keamanan, keadilan, dan persamaan hak secara penuh dalam menjalankan seluruh ajaran agamanya. Dengan nada menyatukan, Hasan al-Banna menambahkan, sejarah panjang yang membentangi hubungan baik dan mulia antara warganegara muslim dan nonmuslim, cukuplah bagi kita sebagai bekal. Kita perlu mencatat prestasi para warga negara yang mulai itu karena mereka menjunjung tinggi makna-makna inipada setiap kesempatan, menjadikan Islam sebagai makna nasionalismenya, meskipun hukum-hukum dan ajaran-ajarannya tidak berasal dari akidah mereka (akidah non Islam).

Dalam rumusannya mengenai prinsip-prinsip dasar sistem sosial Islami sebagaimana dipedomani al-Ikhwan al-Muslimin, Hasan al-Banna menawarkan sebelas prinsip dalam tulisannya *Bainal-Amsi wal-Yaum* (antara kemarin dan hari ini). Salah satu prinsip tersebut adalah mengumandangkan persaudaraan antara manusia, kebangkitan antara pria dan wanita secara bersama solidaritas dan persamaan hak antara pria dan wanita. Serta merumuskan tugas masing-masing secara terinci dan mendetail.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan ini adalah bahwa tawaran Hasan al-Banna tersebut lahir sebagai respon terhadap kondisi umum di Mesir saat itu. Pemimpin umat ini berusaha keras merumuskan instrumen-instrumen untuk melepaskan diri dari kondisi sulit tersebut. Itulah sebabnya, ia menamakan prinsip-prinsip tersebut *al-Munjiyaatul-Asyr* (sepuluh hal yang menyelamatkan). Beberapa prinsip tersebut dapat penulis sebutkan, misalnya: persatuan, kebebasan, menjalankan syariat Islam, dan menegakkan hukum-hukum pidana masing-masing pada urutan pertama, kedua, keenam, dan kedelapan. Konsep yang diajukan al-Ikhwan al-Muslimin ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh banyak organisasi sesudahnya mengalami dinamika aktualisasinya dari waktu ke waktu di bawah panduan sang Mursyid (Hasan al-Banna). Organisasi dakwa ini berupaya memperjelas dinamika perjalannya secara terperinci melalui dialog

terbatas antara Hasan al-Banna dengan sahabat-sahabat terdekatnya. Di bawah ini akan dipaparkan esensi dialog tersebut.<sup>52</sup>

*Pertama*, Hasan al-Banna sejak semula telah berusaha keras menarik kekuatan orang-orang Qibthi Mesir ke dalam barisannya. Keinginannya untuk bekerjasama dengan mereka didasarkan atas persepsi bahwa masing-masing golongan merupakan bagian dari umat dan mempunyai hak untuk dihormati dan dicintai. Muhammad Hamid Abu Naser menceritakan bahwa Hasan al-Banna pernah memintanya untuk mengumumkan kepada warga Ashiuth salah satu wilayah utama Qibthi Mesir, bahwa tujuan dakwa Hasan al-Banna adalah membangun masyarakat beragama. Masyarakat diarahkan untuk berpegang teguh pada agama, termasuk orang-orang kristen. Keagungan dakwa inilah yang mendorong Mathran Qana pejabat sesudah Muhammad Hamid Abu Naser untuk mendukung Hasan al-Banna dan misi dakwanya secara terbuka.<sup>53</sup>

*Kedua*, menjalin ikatan dengan orang yang mempunyai hubungan personal dengan simbol-simbol Qibthiyah. Bahkan Hasan al-Banna pernah mengundang salah seorang rekannya, Luis Fanus, anggota Dewan Perwakilan Rakyat wilayah Abnub, untuk berbincang-bincang bersamanya dan jamaah Ikhwanul Muslimin dalam forum mingguan hari Selasa, Fanus sering menyertai Hasan al-Banna dalam perjalanan mengunjungi kota-kota di Mesir.

*Ketiga*, Hasan al-Banna bekerjasama dengan Luis Fanus dan tokoh-tokoh Qibthi lainnya seperti Wahid Dous dan Karim Tsabit dalam organisasi politik dari seksi penyuluh anggota.

*Keempat*, ketika pemerintahan Husain Siri Pasyah pindah dari Kairo ke Qana pada waktu itu Hasan al-Banna masih menjadi guru, maka orang yang segera meminta tanggapan dalam parlemen mengenai sebab-sebab perpindahan tersebut adalah Taufiq Dous Pasya, seorang Qibthi Mesir. Selain Iqhtil (yang ikut mengantarkan jenazah Hasan al-Banna ke pemakaman), Hasan al-Banna juga menjalin hubungan dengan seorang Qibthi lainnya, Makram Abid Pasya.

---

<sup>52</sup>Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*. (Solo :Era Intermedia, 2000),h. 72,

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 80.

*Kelima*, sebagian orang Qibthi ikut memberikan sumbangan kepada jamaah al-Ikhwan Muslimin dalam rangka membeli wilayah baru untuk para jamaah di Halabiyah Jadidah (Halabi Baru). Setelah pindah, al-Ikwan al Muslimin menerbitkan buku kecil tang mengungkapkan rasa terima kasih atas partisipasi orang-orang Qibthi.

*Keenam*, Hasan al-Banna mengatakan bahwa sebagian tokoh Qibthi mengajukan diri kepadanya untuk bergabung bersama al-Ikhwan al-Muslimin, karena menurut mereka organisasi ini merupakan “saudara orang-orang Mesir” salah seorang tokoh Qibthi juga pernah menghadiri seminar yang digelar oleh al-Ikhwan al-Muslimin di Thantha.

*Ketujuh*, Ahmad Adil Kamal, penuli buku *an-Nuqath Fauqa-Huruf* (titik di atas huruf) menjelaskan bahwa ketika Hasan al-Banna mencalonkan dirinya dalam pemilihan parlemen di Mesir (1944) dari daerah Ismailiyah, maka yang menjadi wakilnya di Kota Thur di tepi Sinai adalah orang kristen Yunani yang nama dimesirkan menjadi Ulu Kharisto. Ahmad Adil mengatakan bahwa sikap Hasan al-Banna itu dimabil berdasarkan pertimbangan praktis. Ketika Hasan al-Banna berhadapan dengan kekuatan politik kelompok sekuler, mereka berusaha menjadikannya terbaratkan dan menolak keberadaannya. Setelah wafatnya Hasan al-Banna, terjadilah kesenjangan ijthihad di tubuh al-Ikhwan al-Muslimin. Kelompok ini terbagi atas pihak yang pro dan kontra dengan jalan (metoda) yang lama. Dua kecenderungan tersebut dapat dicermati pada pemikiran beberapa tokoh al-Ikhwan al-Muslimin yang mewakili dua kecenderungan yang berbeda ini.

*Pertama*, buku Syek Muhammad al-Ghazali, *At-Ta'ashshub wa at-Tasamuh baina al-Masihiyah wa al-Islam* (fanatisme dan toleransi di antara Kristen dan Islam) Cetakan Darul Kutub al-Hadistsah, Kairo cetakan ke-3, 1965, dan buku Syek Yusuf Qardhawi, *Ghairu al-Musliminn fi al-Mujtama' al-Islaami* (yang bukan kaum Muslimin dalam masyarakat Islam) cetakan Maktabah Wahbah, Kairo cetakan ke-1, 1977.

*Kedua*, buku ini mempresentasikan kontinuitas garis pemikiran Hasan al-Banna mengenai kedudukan kaum muslimin. Kedua pemikiran yang menyimpang



dari jalan pertama yang diwakili oleh Sayyid Quthub dengan bukunya Tafsir fi *az-al-Qur'an* ( di bawah lindungan Alquran ) terbutan Darus Syuruq, Beirut, cetakan ke-10, tanpa tahun dan Syek Sa'id Hawwa dengan bukunya *al-Madkhal ila Da'wati al-Ikhwan al-Muslimin* (pintu masuk dakwah al-Ikhwan al-Muslimin) tanpa penerbit. Buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati 50 (lima puluh) tahun al-Ikhwan al-Muslimin.

#### **D. Sikapnya Terhadap Barat dan Ekonomi**

Salah satu sikap Hasan al-Banna dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pemikirannya adalah sikapnya terhadap Barat dan terhadap ekonomi.

Ide-ide dasar dalam tulisan ini dikutip dari terjemahan asli Jabir Rizq, *al-Imam al-Syahid Hasan al-Banna bi al-AqlamiTalamidzihi wa al-Mua'asirih* Kairo: Dar al-Wafa, 1985. Peradaban Barat tidak mendapat tempat bahkan tidak dapat kompromi dalam pemikiran Hasan al-Banna, menurutnya barat yang mempunyai tingkat kemajuan dalam ilmu dan teknologi sesungguhnya mempunyai dasar yang kropos. Ketinggian ilmu dan teknologi yang dimiliki hanyalah sebagai “bom waktu” sebuah kehancuran dalam dirinya sendiri penemuan-penemuan ilmiah, dan sistem Barat yang materialis murni tidak memberikan kesejukan dan ketentraman bagi pemiliknya. Menurutny Islam telah memberikan peradaban sempurna, nilai-nilai tatanan yang terkandung jauh lebih sempurna dari peradaban Barat. Semua hasil peradaban Barat telah tercakup dalam sistem Islam, maka, menurutnya tidak perlu takjub dengan hasil produk peradaban barat. Konsistensi Hasan al-Banna dibuktikan dengan tetap tegak pada sikapnya saat para ulama lain mulai membuka diri dengan tetap memperjuangkan wacananya “peradaban barat yang materialistis bertentangan dengan nilai-nilai rohani dan akhlak dalam Islam”.<sup>54</sup>

Dalam bidang ekonomi, Hasan al-Banna menyeru pada independensi ekonomi umat Islam dari hegemoni ekonomi asing, supaya kekayaan-kekayaannya bisa kembali pada penduduk pribumi sekaligus persiapan memasuki

---

<sup>54</sup>Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, (Robbani Press. Jakarta. 2012), h. 44.

era industri. Ajakan independensi ekonomi umat dari hegemoni asing bukan dakwah teoritis saja, namun ajakan ini dipraktekkan dan dijalankannya. Hasan al-Banna telah ikut berpartisipasi dan menyokong perekonomian bangsa serta mengajak serta rakyat. Ia juga membuat undang-undang khusus bagi *Ikhwanul Muslimin* yang isinya bahwa salah satu tujuan Ikhwan adalah mengembangkan kekayaan bangsa, menjaga dan memerdekakannya. Ia juga menyeru kepada para ikhwan supaya tetap menjalankan roda ekonomi sekalipun ia kaya, menggunakan sebaik-baiknya kekayaan Islam umum dengan mendorong industri dan sumber-sumber ekonomi Islam. Ia menyeru kepada para ikhwan supaya tidak memakai pakaian dan makan kecuali dari buatan negeri Islam.<sup>55</sup>

Demi memperkuat hal tersebut, Hasan al-Banna mendirikan berbagai syirkah untuk menyokong perekonomian negara, seperti *Syirkah al-Mu'amalat al-Islamiyyah*, *asy-Syirkah al-Arabiyyah li al-Manajim wa al-Mahajir*, *Syirkah al-Ikhwan al-Muslimin li al-Gazl wa an-Nasij*, *Syirkah al-Matbaah al-Islamiyyah wa al-Jaridah al-Yaumiyyah*, *Syirkah at-Tijarah wa al-Asygal al-Handasiyyah* di Alexandria, *Syirkah at-Taukilat at-Tijariyyah*, *Syirkah al-I'lanat al-Arabiyyah*, dan masih banyak lagi perseroan milik *Ikhwanul Muslimin* yang tersebar di penjuru Mesir sekarang ini.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, h 53.

<sup>56</sup>Hasan al-Banna, *Mujaddin al-Qarn al-Isyirin al-Hijri*, h. 175-187.

### **BAB III**

#### **PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL-BANNA**

##### **A. Pemikiran Tentang Politik dan Pemerintahan**

Bagi Hasan al-Banna, Islam dan politik ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, karena itu jika ada orang yang berusaha untuk memisahkan keduanya akan sia-sia. Sebab Islam memiliki politik, yang padanya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akherat.<sup>57</sup>

Dalam pemikiran Hasan al-Banna, politik terbagi dua pemahaman, dan keduanya terkait dengan *Hizbiyah* (kepartaian). Yaitu terdiri dari :

##### 1. Politik internal

Adapun yang dimaksud dengan politik internal adalah bagaimana pemerintahan menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengsosialisasikan berbagai kebajikan dan memberikan kesempatan pada setiap unsur masyarakat untuk mengontrolnya sehingga tercipta suatu *check and balance*. Dalam hal mengatur pemerintahan seperti ini Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsipnya, bahkan dalam konteks zalim menzalimi Islam telah memberikan batasan yang tidak boleh dilanggar.<sup>58</sup>

##### 2. Politik eksternal.

Adapun politik eksternal, dalam konteks bagaimana membangun peradaban dan harga diri umat. Di antaranya bagaimana menjaga kebebasan dan kemerdekaan umat, menanamkan rasa percaya diri, kewibawaan umat, maka konsekwensinya umat harus terbebas dari segala macam penjajahan, agar didapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain demi terwujudnya

---

<sup>57</sup>Muhammad Sayyid al-Wakil, *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H*, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001), cet. ke-1, h. 35.

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 45

perdamaian internasional, dan politik eksternal ini Islam memang sudah mempunyai perhatian yang serius agar umatnya memperhatikan masalah hubungan internasional dan menjaga perdamaian. Barang siapa yang mengabaikannya, berarti mereka tidak memahami ajaran Islam atau bahkan telah murtad.<sup>59</sup>

Lebih jauh Hasan al-Banna menegaskan bahwa dasar pijakan politik Islam adalah sistem *syura*. Dalam posisi *syura* merupakan sesuatu yang sangat penting, karna merupakan landasan untuk mengambil sebuah keputusan.<sup>60</sup> Pemahaman seperti di atas merupakan bagian dari pemikiran Hasan al-Banna. Baginya politik tidak selamanya harus identik dengan partai politik. Adapun alasannya menurut Hasan al-Banna kepartaian dan politik keduanya bisa bersatu dan berbeda sama sekali. al-Banna mencontohkan, seorang politisi tidak mesti terlibat langsung dalam struktur partai politik. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang secara struktural masuk dalam kepengurusan partai belum tentu dia mengerti dengan apa yang dinamakan politik, dan ada juga orang yang memang mengerti politik dan terlibat secara intensif dengan partai politik.<sup>61</sup> Lebih lanjut penulis mengutip dua hal penting yang ditekankan oleh Hasan al-Banna :

- a. Sesungguhnya terdapat perbedaan yang mendasar antara kepartaian dan politik. Keduanya mungkin bisa bersatu dan mungkin juga berseteru. Mungkin seseorang bisa disebut politisi dengan segala makna politik yang terkandung didalamnya, namun ia tidak berinteraksi dengan partai atau bahkan tidak ada kecenderungan ke sana. Mungkin pula ada seorang yang berpolitik praktis (terjun kedalam kepartaian) namun sama sekali tidak mengerti dengan permasalahan politik. Mungkin juga ada orang yang menggabungkan antara keduanya sehingga ia menjadi politisi yang berpolitik praktis yang berpolitisi pada porsi yang sama.

---

<sup>59</sup>Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan*, jilid 2, h. 68-72. Lihat juga al-Ghazali, *Meretes Jalan Kebangkitan*, h. 121.

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 181.

<sup>61</sup>Muhammad Sayyid al-Wakil, *Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H*, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2001), cet. ke-1, h. 65.

- b. Sesungguhnya orang-orang non muslim, ketika mereka awan dengan Islam atau dibuat pusing oleh urusan dan kokohnya Islam yang menancap di jiwa pemeluknya, atau kesiapan pemeluk Islam berkorban harta dan jiwa demi tigaknya Islam, maka mereka tidak berusaha melukai jiwa kaum muslimin dengan menodai nama Islam, syari'at, dan undang-undangnya. Akan tetapi, mereka berusaha membatasi substansi Islam pada lingkup sempit yang menghilangkan semua sisi kekuatan operasional yang ada didalamnya.

Selanjutnya mengenai pemikiran Hasan al-Banna tentang partai politik, sangat dipengaruhi oleh kondisi Mesir pada waktu itu yang dijajah oleh Inggris. Di mana sistem partai politik diterapkan di Mesir. Penerapan sistem ini tentu saja bukan tanpa maksud dan tujuan. Inggris menerapkan sistem politik waktu itu bertujuan untuk mengikat Mesir, dengan menjadikan Mesir rela menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Inggris. Di mana hal ini dilakukan tanpa kekerasan, tanpa melakukan tindakan kasar, akan tetapi dengan sabar dan tenang. Politik ini berhasil mewujudkan tidak dalam bentuk perlindungan dan control langsung, akan tetapi dalam bentuk intervensi Inggris dalam mengatur komposisi pemerintahan dan administrasi Mesir melalui sistem yang akan menyibukkan orang-orang Mesir sendiri.<sup>62</sup>

Oleh karena itu dibentuklah sistem demokrasi liberal, di mana partai-partai tumbuh bak jamur di musim hujan. Ironisnya partai-partai tersebut bukan membela kepentingan rakyat, tapi lebih membela kepentingan politik sesaat dan kelompoknya. Sistem parlementer dengan demokrasi liberal menggunakan sistem multi partai yang dibuat Inggris untuk Mesir melahirkan banyaknya partai politik.

Kondisi inilah yang dikritik oleh Hasan al-Banna, menurutnya sistem multi partai mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi di sebagian negara, tapi

---

<sup>62</sup>Thariq Basyri, *al-Muslimun wa al-Jama'ah al-Wathaniyah, Hai'ah Misriyah al-Ammah lil Kitab*, (Kairo: tt), h. 171. Dalam Usman Abdul Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2000), cet. ke-1, h. 147.

belum tentu sesuai untuk keseluruhannya. Sistem multi partai yang selama ini diterapkan di Mesir tidak sesuai dengan kondisi dan situasi politik negara Mesir. Karna Negara Mesir sedang menapaki era baru dan sedang membangun bangsanya supaya kokoh. Upaya membangun Mesir ini tentu saja membutuhkan penyatuan potensi, terkumpulnya berbagai kekuatan, pemanfaatan setiap spesialisasi, dan mencurahkan waktu sepenuhnya untuk upaya-upaya perbaikan.<sup>63</sup>

Sedangkan apa yang terjadi dengan Mesir pada waktu itu, menurut Hasan al-Banna belum mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam berbagai aspek. Karena itu adanya multi partai hanya akan memicu perselisihan dan pertengkaran semata, bukan sebuah jawaban bagi bangsa yang baru merdeka. Bangsa Mesir saat itu memerlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa. Karna itu tidak berlebihan Hasan al-Banna menduga bahwa banyaknya partai politik merupakan kendaraan bagi pihak asing untuk mengobok-obok kondisi umat. Alasannya sederhana, kalau suatu partai menang, maka partai yang lain kan mengintai untuk mencari kelemahan lawan dan terus menunjukkan sikap perlawanannya terhadap yagn lain. Lalu apa yang di dapatkan rakyat, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan kerugian yang sangat besar menyangkut harga diri, kemerdekaan dan moral.<sup>64</sup>

Selanjutnya Hasan al-Banna menjelaskan bahwa jika Mesir sudah menjadi bangsa yang “sempurna kemerdekaanya” dan telah menemukan jati dirinya, maka pembentukan sistem multi partai menjadi sebuah keniscyaan yang tidak bisa dihindarkan. Namun bagi bangsa yang baru saja merdeka, maka partai politik tidak layak untuk ada didalamnya. Ketidaksetujuan Hasan al-Banna akan partai politik lebih mendapatkan legitimasinya ketika partai politik yang ada di Mesir tidak lebih dan tidak bukan dari sekedar sebuah partai “karbitan” daripada sungguhan. Kemunculan berbagai partai politik di Mesir lebih didorong oleh inisiatif pribadi, daripada kepentingan nasional. Karna itu, Hasan al-Banna

---

<sup>63</sup>Hasan al-Banna, *Risalah pergerakan*, (Iskandariyah: Dar-al-Dakwah, 1990), jilid 2, h. 68.

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 80.

menilai jika memang pada kenyataannya system multi partai malah membuat umat ja di terpecah belah, terjadi perselisihan dan permusuhan, maka ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>65</sup>

Hasan al-Banna juga meyakini tidak bergunanya praktek koalisi antar partai dan meyakini bahwa itu hanya penenang bukan penyembuh, karena betapa cepatnya orang-orang yang berkoalisi itu bubar, lalu kembali bertikai, bahkan lebih seru daripada sebelum bertikoalisi. Obat yang paling mujarab adalah ketika partai-partai ini dilenyapkan secara sukarela, tugas mereka telah selesai dan usai pula kondisi yang dahulu melahirkannya. Untuk mengetahui pemikiran Hasan al-Banna dalam bidang politik terlihat dari gerakan *al-Ikhwan al-Muslimun*, eksis hingga sampai sekarang ini, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Konsepsi Dakwah

Penanaman keimanan yang kuat pada diri Muslim adalah senjata utama dalam meneruskan dan menyebarkan dakwah Islam dalam beberapa dimensi dan objek garapannya.<sup>66</sup> Dalam *Ikhwan al-Muslimin* berorientasi pada hal yang prinsipil, beraliansi dengan pengembangan nilai-nilai keislaman. Islam adalah agama yang telah mengatur perikehidupan Muslim secara mapan, membimbing umatnya pada jalan yang di ridhoi Allah SWT., Dan meningkatkan *muwajjahah* diri pada sang Khalik, sebagai manifestasi akan nikmat serta karunia-Nya. Walhasil, sebagai pesan-pesan Ilahi Rabbi harus mampu diterima oleh kalangan masyarakat tanpa melihat strata sosial, kondisi lingkungan dan terutama tingkatan intelektualitas yang mesti diperhitungkan dalam penyampaian dakwah.<sup>67</sup>

Sesuai kontek zamannya, *Ikhwan al-Muslimin* dalam mempersiapkan para Dai dengan keilmuan yang cukup handal; memiliki spesialisasi keilmuan dalam berdakwah karena dakwah sekarang berlainan dengan dakwah pada masa-masa

---

<sup>65</sup>Hasan al-Banna, *Risalah pergerakan*, (Iskandariyah: Dar-al-Dakwah, 1990), jilid 2, h. 81.

<sup>66</sup>M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Dapan; Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1, h. 69.

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 72.

lalu. Dai sekarang ini di tuntut memiliki kedalaman keilmuan, berlatih secara kontinyu, lebih-lebih para Dai di negara-negara Barat yang sudah terlatih dengan baik, sehingga memiliki keahlian yang memadai dan pemikiran yang mantap, mampu mempredisikan strategi dakwah yang dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, media dakwah sekarang berlainan juga dengan dahulu. Dakwah pada masa lampau cukup disampaikan dalam khutbah-khutbah, pesan yang ditulis dalam sebuah surat maupun dakwah biasa. Sedangkan dakwah sekarang adalah dengan brosur-brosur, majalah, berita harian serta sarana informatika lainnya yang sedang tren saat ini.

Tentunya, *profesionalisasi* dakwah telah di tata oleh Hasan al-Banna dengan seakurat mungkin; memperhatikan komponen sosial yang ada serta telah terorganisasi dengan rapi. Memang, mengelola gerakan Islam tidak cukup dengan penyampaian beberapa perintah yang telah digaris bawahi oleh Tuhan melalui firman-firman-Nya. Namun, jauh dari itu, sebuah organisasi Islam perlu di organisasi secara baik. “kebaikan yang tidak terorganisasi akan terkalahkan oleh kebathilan yang terorganisasi”.<sup>68</sup>

Sebagai sebuah organisasi Islam, *al-Ikhwan al-Muslimin* mengorganisasi dakwahnya secara teratur disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Tujuan Islam tidak akan terealisasi tanpa terorganisasi, “suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan melaksanakan kewajiban”.
- b. Salah satu sifat manusia adalah berpaling dari saudaranya, mereka itulah yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah, kecuali dengan sikap loyal.
- c. Seorang muslim harus taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin. “*Taatlah kamu sekalian kepada Allah Rasul-Nya, dan pemimpin diantaramu*”.
- d. Seorang harus melaksanakan sandaran hidupnya pada Islam dan mendidik dirinya dengan Islam.

---

<sup>68</sup>M. Aunul Abied Shah, *Islam Garda Dapan; Mozaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), cet. ke-1, h. 73.



- e. Seorang (anggota organisasi) diharuskan menerapkan ilmunya dalam organisasi itu.<sup>69</sup>

Adapun prioritas dakwah *al-Ikhwān al-Muslimīn* dibagi menjadi dua fase utama. *Pertama*, dakwah pada abad ke-19 M., yang terfokuskan pada :

- a. Pembentukan diri Muslim sejati.
- b. Terciptanya keluarga Islami.
- c. Masyarakat Islami.
- d. Pemerintahan Islami.

*Kedua*, dakwah pada masa-masa selanjutnya, sebagai *follow-up* dari realisasi dakwah pada tahun-tahun pertama yang penekanan dakwahnya ialah :

- a. Islamisasi alam Islami (dunia).
- b. *Justifikasi eksistensi* akal.
- c. *Revitalisasi* agama.<sup>70</sup>

## 2. Konsep Tarbiyah

Menurut Hasan al-Banna pendidikan politik adalah berbagai upaya yang mereka curahkan dalam rangka membentuk dan menumbuhkan keyakinan-keyakinan, pengetahuan-pengetahuan, dan orientasi-orientasi yang menjadikan mereka positif dan sadar menerima prinsip-prinsip dan tujuan Islam serta komitmen dengannya, menghapus pengaruh-pengaruh *imprealisme* dengan segala bentuknya dari jiwa masyarakat yang menjadi objek perjuangan jama'ah ini, menghantarkan mereka kepada pemikiran-pemikiran yang bebas yang di dasarkan kepada asas-asas Islam, dalam aspek pemerintahan dan berbagai urusan, baik internak maupun eksternal, menyadarkan mereka akan berbagai persoalan regional, nasional dan Internasional yang tengah bergulir, serta berbagai hakikat yang terjadi di lapangan politik.<sup>71</sup>

Menurut Hasan al-Banna Pada *Ikhwān al-Muslimīn* Perangkat-Perangkat Tarbiyah/Pendidikan Politik terdiri dari :

---

<sup>69</sup>Said Hawwa, *al-Madkhal ila Dakwah Ikhwān al-Muslimīn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1983), cet. ke-3, h. 170-171.

<sup>70</sup>Said Hawwa, *al-Madkhal ila Dakwah Ikhwān al-Muslimīn*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1983), cet. ke-3, h. 173.

<sup>71</sup>Sulaiman Nasim, *as-Shiyaghah at-Ta'lim al-Mishri al-Hadits*, h. 132.

a. *Katibah*

*Katibah* adalah sekumpulan dari kalangan Ikhwan aktivis pilihan yang jumlahnya mencapai 40 orang, di dalam satu kampung *Ikhwanul al-Muslimmin*, yang tunduk pada sistem tertentu. Sistem kependidikan *katibah* melalui berbagai dokumen yang diperolehnya :

Struktur dan sistem *katibah*. *Katibah* waktu itu tersusun dari empat puluh anggota aktif. Dalam dokumen lain disebutkan bahwa *katibah* tersusun dari lima *raih usrah* (ini berarti bahwa ia terdiri dari 1000 orang anggota). Hanya saja, ini tidak terjadi secara konkret, karena *katibahkatibah* yang benar-benar ada jumlah anggotanya berkisar antara 40 sampai 80 aktivis Ikhwan, yakni kumpulan dari empat *usrah Ikhwan*, jika jumlah *usrah* itu sepuluh orang, dan delapan *usrah* jika jumlah anggota *usrah* lima orang, dan inilah yang relevan dengan tujuan edukatif *katibah*. Jumlah itu terdiri dari para mahasiswa, buruh, pegawai, pedagang, dan setiap yang masuk dalam barisan Ikhwan aktif.

Program-program edukatif yang berhubungan dengan *katibah* :

1) Program spiritual

Pembinaan spiritual Ikhwan adalah tujuan mendasar *katibah*. Hal ini tercapai melalui shalat fardhu berjama'ah, shalat tahajud sebelum fajar, *al-Istighfar*, *qiraatul al-Qur'an*, *dzikir* pagi, *wirid al-Qur'an*, spirit yang bergerak di sela-sela pertemuan itu, berikutan berbagai perasaan yang menyebar di dalamnya.

2) Program moral

Dalam *katibah* terdapat beberapa komitmen berikut :

- a) Rukun-rukun *bai'at* dan kewajiban-kewajiban anggota aktif yang memiliki sifat moral, yaitu terdiri dari 39 komitmen moral, yang setiap anggota *katibah* harus mengikatkan diri dengannya.
- b) Tata tertib *katibah*, yaitu sejumlah moralitas yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota.
- c) Daftar *muhasabah*, yaitu sebuah daftar yang memuat sebanyak dua puluh pertanyaan yang akan dijawab oleh anggota *katibah* sebelum tidur-sendirian-dengan kata ya atau tidak, selama tiga puluh hari, kemudian menyerahkannya kepada *naqib katibah*.

### 3) Program ilmiah dan *tatsqifiah*

Di antara tujuan *katibah* adalah agar para anggotanya memperoleh sejumlah ilmu untuk mengembangkan pemikiran dan intelektual mereka, dengan cara mengkaji hal-hal penting yang harus diketahui, baik menyangkut masalah agama maupun dunia mereka. Hal itu tercapai melalui program berikut :

- a) Kajian terhadap ajaran Islam dengan pertemuan *katibah*.
- b) Komitmen untuk mengkaji buku-buku yang termuat dalam risalah atau daftar buku-buku (*manhaj 'ilmi*) yang dibagikan kepada anggota *katibah*.
- c) Komitmen dalam tugas-tugas ilmiah yang ada dalam *wajibat al-Akh al-'Amil*.<sup>72</sup>

### 4) Program sosial

Tujuan itu tercapai melalui program-program berikut :

- a) Perkenalan secara lengkap antara anggota *katibah* pada setiap kali pertemuan, sebagaimana disebut didepan.
- b) Partisipasi yang setara dan saling menanggung pada seluruh aktivitas *katibah*, dalam bentuk partisipasi kolektif, ketika makan, shalat, olahraga, dan dzikir jama'i.

### 5) Program olahraga

Dalam sistem *katibah*, jelas bahwa ada latihan olahraga setelah dzikir pagi, sebelum makan pagi. Latihan itu dilakukan dalam udara segar atau tempat pertemuan *katibah* jika tempatnya luas, dengan berbaris rapi.

### b. *Usrah*

*Usrah* sebagai sistem pendidikan, telah dimulai karena dua sebab, tekanan eksternal terhadap jama'ah *al-Ikhwān al-Muslimun* yang memaksa untuk mengembangkan sistem pendidikan yang dapat mengantisipasi berbagai bentuk tekanan yang berbahaya. *Usrah* adalah sistem yang diikuti dalam seluruh Jama'ah lainnya. *Usrah* terdiri dari jumlah anggota yang terbatas, berkumpul pada suatu

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, h. 559.

malam dalam sepekan di rumah salah seorang anggota , atau tempat dimana pun dan kapan pun tanpa ketentuan.<sup>73</sup>

Program-program edukatif dalam usrah yang di realisasikan tujuantujuan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Program ilmiah *Tatsqifiah*.
- 2) Program sosial.
- 3) Program moral dan spiritual.

c. *Nizham Khash*

*Nizham khash* merupakan salah satu unit pendidikan *al-Ikwan al-Muslimun* ia adalah perangkat pendidikan kelompok khusus *Ikhwan*.

Program-program edukatif dalam *Nizham khash* yaitu;

- 1) Program pengembangan wawasan.
- 2) Program training.
- 3) Dan program penanaman spiritual dan moral.<sup>74</sup>

d. *Muktamar*

Hasan al-Banna mengatakan bahwa tujuan *muktamar* adalah memahami umat akan hak-haknya, menyadarkan bangsa kepada tuntutan-tuntutannya yang benar serta membannngkitkan hasrat kuat mereka untuk memperoleh hak-haknya itu. Tujuan *tarbiyah muktamar* adalah:

- 1) Agar anggota mampu berdiskusi dan bertukar pikiran.
- 2) Agar anggota memiliki pendapat dan adapt berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 3) Agar anggota memiliki kesadaran politik dalam menyingkapi persoalan politik yang mendesak untuk disikapi.
- 4) Agar anggota mengerti pendirian politik jama'ahnya ketika berhadapan dengan persoalan yang bergulir.
- 5) Agar anggota memiliki loyalitas terhadap prinsip-prinsip jama'ah dan selalu ingat akan tujuan-tujuannya.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 600.

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 602.

- 6) Agar anggota memiliki perhatian untuk melakukan hubungan sosial, saling mamahami, dan saling bersaudara dengan semua anggota.

e. *Daurah dan Muhadarah Tatqifiyah*

Hasan al-Banna memberikan perhatian kepada usaha mempersiapkan para Da'i untuk Ikhwan melalui *nizham khusus*, disamping *usrah*, *katibah*, dan kajian-kajian umum. Yang menonjol dari daurah-daurah ini adalah tiga yaitu :

- 1) *Madrasah at-Tahtzib di Ismailia*
- 2) *Firaq at-Tadrib 'ala al-Irsyad*
- 3) *Nizham al-Barnamij ats-Tsaqafi al-Ikhwan*

f. Pers

Pada tahun 1933 mulailah *al-Ikhwan* menerbitkan koran dan majalah sebagai sarana pendidikan. Tujuan *tarbiyah* ini mereka jelaskan dalam setiap jurnal yang mereka terbitkan. Koran *al-Ikhwan al-Muslimun* yang pertama merupakan koran pedidikan bagi al-Ikhwan yang berisi seruan kepada prinsip-prinsip mereka. Sedangkan majalah *an-Nadzir* memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada khalayak tentang politik *al-Ikwan* baik internal maupun eksternal.

Dengan cara yang dapat dipahami , juga untuk menjelaskan *fikrah* tentang pemerintahan Islam dan tanah air Islam, serta pendidikan nasionalisme berdasarkan prinsip Islam.<sup>75</sup>

g. *Nizham al-Jawwalah* (Kepanduan)

Hasan al-Banna mendirikan grup-grup *rihlah*, dalam rangka mawadahi aktivitas olahraga. Ispirasinya adalah ide jihad dalam Islam, bersamaan dengan pendirian cabang pertama *Ikhwan* di Ismailia, pada tahun 1928. Selanjutnya ia mendirikan laagi grup-grup serupa lainnya di Kairo dan setiap cabang *Ikhwan*. Grup-grup inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya *jawwalah*.

---

<sup>75</sup>Shalih Asymaswi, *Siyasatuna*, dalam *Majalah an-Nadzir*, Th I, No. 1 (30 Rabi'ul Aww.al 1357), h. 6

Program-program *jawwalah* yang bersifat *tarbiyah*/edukatif adalah sebagai berikut:

1) *Rihlah*

Analisis tentang *rihlah* dapat di klasifikasikan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan pendidikan yang di kandunginya yaitu :

- a) *Rihlah tsaqafiah dirasiyah* (studi) dan *iktiksyafiah* (eksplorasi).
- b) *Rihlah riyadhiyah* (olahraga).
- c) *Rihlah* untuk mengunjungi keindahan alam.
- d) *Rihlah* safari.

2) *Mu'askar*

*Mu'askar* bukan hanya perangkat pendidikan pokok dalam ke panduan, akan tetapi juga perangkat pendidikan bagi setiap individu *Ikhwan*. Tujuan *Mu'askar* ini adalah untuk :

- a) Melatih personal agar dapat membebaskan dirinya dari berbagai kebiasaan yang tidak patut.
- b) Membiasakan personal untuk memiliki perilaku Islami.
- c) Membiasakan personal agar selalu berolahraga
- d) Membiasakan personal agar disiplin dengan perilaku yang disukai orang lain.
- e) Melatih personal untuk mampu memberikan pelayanan.
- f) Mengembangkan kemampuan personal untuk memikul tanggung jawab, pandai *me-mannage* dan memiliki keberanian.
- g) Melatih sebgai personal agar menjadi leader
- h) Menumbuhkan rasa kepekaan dan simpati terhadap orang lain.
- i) Memperkuat loyalitas.
- j) Membekali personal dengan pengetahuan dan kebudayaan yang berhubungan dengan Islam dan persoalan-persoalan politik.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Hasan al-Banna, *Mudzakkirat ad-gakwah wa ad-Dai'iyah*, h. 108-238

## B. Pemikiran Hasan al-Banna tentang Rakyat

Hasan al-Banna menjelaskan, di antara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu, kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil masukan-masukan yang baik. Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan hal itu, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran :

﴿الْمُتَوَكِّلِينَ حُبُّ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتُ فَإِذَا الْأَمْرُ فِي وَشَاوَرَهُمْ﴾

Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Al-Imron : 159)

Bahkan, Allah memuji kaum muslimin yang mau bermusyawarah sebagai muslimin yang baik ,sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka` (Asy-Syura: 38).

﴿مَعْلُومٍ يَوْمَ لَمِيقَاتِ السَّحَرَةِ فَجُمِعَ﴾

Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum (QS. Aasy-Syurâ: 38).

Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunah Rasulullah Saw., dan Khaulafur Rasyidin. Ketika muncul suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, bermusyawarah, dan mengambil pendapat yang benar dari

mereka. Lebih dari itu, para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) pada pendapat yang benar. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, „Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah. Umar bin Khatthab berkata, “Siapa saja yang melihatku menyimpang, maka luruskanlah”.<sup>77</sup>

### **C. Pemikirannya Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan**

Hasan Al-Banna menyesuaikan isi negara Islam dengan sistem politik yang ada di Mesir, ia menghindari konfrontasi dengan negara dan cenderung menyatakan pandangan secara umum, serta enggan menyebutkan visi negara Islam. Dia tidak menyerukan untuk mengganti tatanan politik yang sedang berlaku di Mesir, bahkan ia berusaha memperbaikinya.

Seruan negara Islam Hasan Al-Banna agaknya bertentangan dengan nasionalis Mesir yang sedang dominan waktu itu, maka beliau mendiskusikan konsep patriotisme dan membentuk nasionalisme Ikhwanul Muslimin. Dia menyatakan bahwa dirinya siap memperkuat Mesir sebagai negara Islam, dan mengungkapkan bahwa patriotisme bangsa Mesir merupakan perwujudan cinta tanah air kaum muslimin, beliau setuju dengan nasionalisme, apabila berupaya membuat warga negara sadar dengan sejarahnya dan solidaritas muslim. Dia mengatakan “Adalah kesalahan besar bagi mereka yang menyatakan bahwa Ikhwanul Muslimin apatais terhadap masalah tanah air dan nasionalisme. Kaum muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi tanah air mereka dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya”.<sup>78</sup>

Adapun mengenai negara (Pemerintahan), dalam kitabnya *Nizhamul al-Hukkam* Hasan al-Banna menyatakan bahwa Islam yang hanif ini mengharuskan pemeintahannya menjadi salah satu penegak dari beberapa penegak sistem sosial

---

<sup>77</sup>Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 21.

<sup>78</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali *Pilar-Pilar Kebangkitan Umat*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2001), h. 157.



yang hadir untuk umat manusia. Islam tidak mentolerir kekacauan, dan tidak membiarkan umat Islam hidup tanpa pemimpin.

Rasulullah *Saw.*, bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.” (*HR Abu Dawud, dari Abu Hurairah*).<sup>79</sup>

Adapun teori tentang bentuk suatu entitas yang dapat dinamakan negara, maka hal tersebut sangatlah *liquid* dalam artian teori tentang hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, yang dalam abad ini kita memandang konsep negara sebagai suatu *Nation State* (negara bangsa), namun fungsi negara yang pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas tetaplah melekat pada entitas yang bernama negara. Dari pengertian-pengertian di atas dengan jelas dapat kita pahami bahwasannya Islam dalam pemahaman Hasan Al-Banna sangatlah terkait dengan fungsi negara atau pemerintahan sebagai suatu entitas yang memiliki kekuatan dan wewenang, yang diberikan oleh masyarakat (umat), untuk mengatur urusan-urusan yang berlaku di antara manusia, termasuk menegakkan syariat dalam salah satu risalahnya ia mengutip perkataan dari Utsman bin Affan ra. “Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicegah dengan Alqur’an”.

Oleh karena itu, sikap pemikiran Ikhwan terhadap pemerintahan berkaitan erat dengan pemahaman mereka terhadap esensi Islam dan aqidahnya Islam sebagaimana yang dipahami oleh Ikhwanul Muslimin menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya. Islam adalah kedaulatan dan pemerintahan ia juga peraturan, dan pengajaran, sebagaimana ia adalah undang-undang dan peradilan. Salah satu diantaranya tidak terpisahkan dari yang lain.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 297-298.

<sup>80</sup> Usman Abdul Mu’iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h. 286.

Ikhwanul Muslimin, sebagai gerakan Islam kontemporer dari Mesir turut berupaya menawarkan konsepsi terkait dengan negara (Islam). Konsepsi yang direpresentasikan oleh pendirinya Hasan al-Banna dirumuskan dari Alquran dan Sunnah dan pemerintahan harus tegak di atas kaidah sistem sosial yang telah digariskan Allah.<sup>81</sup> Ikhwanul Muslimin melihat bahwa negara juga bagian dari aqidah Islam itu sendiri. Sebagaimana manifestasi karakter Islam yang membawa *rahmatan lil alamin*, negara diharapkan juga memberikan jaminan keamanan, kesejahteraan dan hak-hak hidup yang lainnya bagi rakyatnya. Al-Banna mengatakan *Daulah Islamiyah* tidak akan tegak kecuali bertumpuh pada pondasi dakwah,<sup>82</sup> bahwa Alquran merupakan kitab suci yang mencakup semua prinsip reformasi sosial yang komprehensif sehingga Alquran menjadi dasar bagi rekonstruksi *daulah Islamiyah*.

Selain prinsip-prinsip rekonstruksi *daulah Islamiyah* juga terdapat kewajiban-kewajiban syiar yang mendukung rekonstruksi ini. Secara ringkas, prinsip-prinsip rekonstruksi *daulah Islamiyah* itu adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan motivasi internal, yaitu *aqidah islamiyah*.
2. Persiapan mental dalam arti meningkatkan kualitas jiwa dan mengendalikan naluri manusia.
3. Memerangi rasialisme dengan menegakkan ukhuwah, solidaritas dan emansipasi wanita.
4. Persiapan individu (moral, keilmuan, dan ketrampilan).
5. Melindungi hak-hak asasi manusia (moral maupun material).
6. Memelihara stabilitas dalam negeri (mengikis habis sparatisme dan bertindak tegas terhadap tindak kejahatan yang berat).
7. Menjaga kedaulatan dan batas-batas negara (kewajiban jihad).
8. Tanggung jawab peradaban (menyebarkan prinsip-prinsip kebenaran yang diusung oleh Islam).

---

<sup>81</sup>Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1*, h. 297.

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 298.

Sementara itu, syiar-syiar terapan yang menopang proses rekonstruksi ini merupakan kewajiban-kewajiban pada level individu dan masyarakat muslim. Berbicara masalah negara, tidak bisa lepas dari tema politik, sehingga Hasan Al-Banna mengungkapkan bahwa seorang muslim adalah politikus yang bertolak dari keislamannya, politikus yang berpandangan jauh kedepan dan antusias terhadap problematika umat.<sup>83</sup> Titik tolak kebangkitan berasal dari pengendalian pemikiran politik yakni berangkat dari integralitas Islam yang mewajibkan adanya perjuangan politik. *Daulah* (negara) adalah pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan atau kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah kekuatan yang *legitimate* atau lembaga politik yang memiliki wewenang secara mutlak untuk menata kehidupan umum disebuah wilayah melalui departemen-departemen yang telah ditetapkan.

Negara harus mencerminkan *fikrah* Islam sebagai sistem hidup yang paripurna yakni ,Daulah yang mencerminkan fikrah, tegak untuk melindunginya, bertanggung jawab untuk merealisasikan target-targetnya di tengah masyarakat Islam dan menyebarkannya ke seluruh umat manusia. *Daulah Islamiah* yang berdaulat, yang menjalankan hukum-hukum Islam, menerapkan sistem sosial, memproklamkan prinsip-prinsipnya yang luhur dan menyebarkan dakwahnya yang bijak kepada umat manusia (*Risâlah Bain al amsi wa al-yaum* ).<sup>84</sup>

Secara ringkas Hasan Al-Banna mengungkapkan beberapa karakteristik dan kewajiban serta hak-hak negara:<sup>85</sup> Adapun Karakteristik negara terdiri dari: (1) kesadaran akan tanggung jawab; (2) kasih sayang terhadap rakyat; (3) bertindak adil kepada umat manusia; (4) bersikap *iffah* (menjaga diri) dari harta milik umum; dan (5) ekonomis dalam pemanfaatannya. Sementara itu, kewajiban-kewajiban negara terdiri dari: (1) menjaga keamanan; (2) melaksanakan undang-undang; (3) menyebarkan pendidikan; (4) menyiapkan kekuatan; (5) memelihara kesehatan; (6) memelihara kepentingan umum; (7) mengembangkan sumber daya alam dan menjaga harta kekayaan; dan (8) mengokohkan akhlak dan

---

<sup>83</sup> Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin jilid I*, h. 100.

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 207.

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 83.

menyebarkan dakwah. Adapun hak-hak negara yaitu:<sup>86</sup> (1) loyalitas dan ketaatan; dan (2) dukungan dengan jiwa dan harta terkait sistem pemerintahan.

Selain itu, Al-Banna memandang bahwa perlu adanya pemisahan antara tiga fungsi (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) dalam suatu negara karena penggabungan dan pengkonsentrasian tiga fungsi di atas akan mengarah pada otoritarianisme dan diktatoritas. Selain itu, diperlukan adanya perbaikan manajerial pada lembaga-lembaga negara (yang harus disesuaikan dengan ajaran Islam).<sup>87</sup>

#### **D. Pemikirannya Tentang Hukum**

Dalam bidang politik dan hukum, Hasan al-Banna mengajak kepada penerapan syariah Islam di semua lini kehidupan. Sebab, dalam pandangannya, syariat Islam adalah syariah Tuhan yang hadir untuk menciptakan kemaslahatan manusia, dan bisa berkembang demi menghadapi tantangan kehidupan melalui jalan ijtihad dan tajdid yang berkelanjutan.<sup>88</sup>

Terkadang sebagian orang dan sebagian ikhwan mendengarkan slogan “Alquran dusturuna” itu artinya mereka menolak hukum positif apapun. Akan tetapi sebenarnya, yang dimaksud dengan slogan itu adalah menjadikan sebagai rujukan tertinggi, kepadanya kita kembalikan segala urusan. Maka aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Dengan demikian, boleh bagi umat Islam untuk membuat aturan-aturan yang lebih detail yang merupakan pejabaran dari Alquran untuk diimplementasikan dalam kehidupan praktis, serta aturan-aturan detail lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Aqidah dan syariat Islam.<sup>89</sup>

Dalam berbagai tulisan Hassan al-Banna, dapat ditarik pandangan yang jelas tentang persamaan hak antara kaum muslimin dan non muslimin. Hasan al-Banna membahasnya dalam tulisan *Nahwan Nuur* (menuju cahaya) yang pada

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 183-184.

<sup>87</sup>Usman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h. 304.

<sup>88</sup>Hasan al-Banna, *Majmuah ar-Rasail, Risalah ila asy-Syabab*, h. 188.

<sup>89</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah wa Madrasah Hasan al-Bannâ*, (Kairo: Maktabah Wahbiyyah, 1992), h. 53

dasarnya ditujukan padapenguasa dan pejabat tinggi Mesir selama kurang lebihsetengah abad. Karya itu berjudul *Al-Islam Yahmiil Aqalliyyaati wa Yashuunu Huqunqal Ajaanib* (Islam menjagakelompok minoritas dan memelihara hak-hak orang lain).

Dalam buku itu dinyatakan Islam menyucikan persatuan manusia secara universal. Kemudian mensucikan persatuan agama secara universal pula ketika terjadi fanatisme. Islam mengharuskan para pemeluknya untuk mengimani seluruh agama samawi. Kemudian Hassan al-Banna menegaskan, inilah yang Islam yang dibangun di atas sikap moderat dan kesadaran tinggi, tidak mungkin diikuti oleh pemecah belah persatuan yang terpadu ini. Namun sebaliknya, kesucian agama yang mampu mempersatukan manusia ini terkadang dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu.

Pemimpin umat ini berusaha keras merumuskan instrumen-instrumen untuk melepaskan diri dari kondisi sulit tersebut. Itulah sebabnya, ia menamakan prinsip-prinsip tersebut *al-Munjiyaatul Asyr* (sepuluh hal yang menyelamatkan). Beberapa prinsip tersebut dapat penulis sebutkan, misalnya : persatuan, kebebasan, menjalankan syariat Islam, dan menegakkan hukum-hukum pidana masing-masing pada urutan pertama, kedua, keenam, dan kedelapan. Konsep yang diajukan al-Ikhwan al-Muslimun ini yang kemudian dijadikan rujukan oleh banyak organisasi sesudahnya mengalami dinamika aktualisasinya dari waktu ke waktu di bawah panduan sang Mursyid (Hassan al-Banna). Organisasi dakwa ini berupaya memperjela dinamika perjalannya secara terperinci melalui dialog terbatas antara Hassan al-Banna dengan sahabat-sahabat terdekatnya.

#### **E. Pemikirannya tentang Hubungan dengan Negara Lain**

Selain di Mesir, Pemikiran Hasan Al-Banna melalui Organisasi yang didirikannya yaitu Ikhwanul Muslimin juga berkembang di luar negeri seperti Syiria, Irak, Palestina, Yordania, Yaman, Sudan dan lain-lain.

Di Irak, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Syekh Muhammad Mahmud As-Sawwaf. Ia kemudian terpilih sebagai pemimpin umum gerakan Ikhwanul

Muslimin di negeri itu. Dia juga memiliki banyak karya tulis dan memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan Islam di benua Afrika.

Setelah berpindah dari Irak 1959 M, dia menetap di Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan di Syiria, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Dr. Mustafa As-Siba'i (1334-1384 H/ 1915-1964 M). Dia adalah Pimpinan Umum Ikhwanul Muslimin yang pertama di Syiria. Ia berhasil meraih gelar doktor dari *Fakultas Islamic Law*, Universitas Al-Azhar Mesir tahun 1948 M. dan memimpin pasukan Ikhwanul Muslimin pada Perang Palestina pada 1948, kemudian mencalonkan diri ke Majelis Syura sebagai wakil rakyat dari kota Damaskus. Dia adalah seorang orator kritis yang terkenal. Dia juga dikenal sebagai pendiri Fakultas Syariah di Damaskus tahun 1954 M dan menjadi dekan pertama fakultas ini. Ia memiliki banyak karya tulis, seperti Sunah dan Kedudukannya di dalam Hukum Islam (*As-Sunnah Wamakanatuha fi At-tasyri'*), Perempuan antara Fiqih dan Hukum (*Al-Mar'ah baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*), dan Hukum Ahwal Syakhsyah (*Qanun Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*). Sedangkan di Jordania, IM diprakarsai oleh Syekh Abdul Latif Abu Qurah. Pada tanggal 13 Ramadhan 1364 H/ 19 November 1945 M, terbentuk Ikhwanul Muslimin di Jordania. Dia menjadi Pimpinan Umum IM yang pertama di Jordania, dia juga yang memimpin Ikhwanul Muslimin Jordania dalam perang Palestina 1948. Kemudian ia digantikan oleh Muhammad Abdur Rahman Khalifah.<sup>90</sup>

Pada akhir Perang Dunia Pertama, pengaruh Ikhwanul Muslimin sangat besar di seluruh Mesir, sehingga *harakah* (gerakan) itu bisa disebut sebagai pemerintahan dalam pemerintahan. Hampir tidak dijumpai kampung atau kota yang ada di Mesir melainkan terdapat cabang Ikhwanul Muslimin. *Fikrah* (pemikiran) dan *harakah* (pergerakan) ini telah tersebar ke sekolah-sekolah, masjid-masjid dan pusat-pusat kebaikan seluruh Mesir. Majalah, *risalah*, surat kabar, dan buku-buku mereka tersebar luas.

Bukan hanya itu pengaruh Ikhwanul Muslimin tersebar luas hingga di luar negara Mesir. Pemuda-pemuda di negara-negara Islam mulai membuka Cabang

---

<sup>90</sup>Rahmat, M. Imdadun. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 35

IM di Syria, Libanon, Yordania, Palestina, Irak dan lain-lain. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia masa terasa getarannya hingga kini.

## BAB IV

### PENGARUH PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA TERHADAP IDEOLOGI DAN GERAKAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR

#### A. Pengaruhnya Terhadap Ideologi Politik Hasan Al-Banna

Di setiap tempat selalu ada pemikir dalam bidang politik dalam skala yang berbeda. Dalam skala Timur Tengah, pemikiran politik dari Mesir Kuno hingga Mesir Modern memiliki pengaruh bagi wilayah, bahkan lintas daerah. Nasionalisme Arab, sebagai contoh selain tentang Zionisme dan ideologi kiri Islam, menurut A. Rahman Zainuddin adalah jenis pemikiran yang dianggap sangat menentukan dewasa ini.<sup>91</sup>

Di Mesir, menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebelum adanya dakwah Hasan al-Banna dan lembaga pendidikan yang beliau dirikan, aspek politik tidak mendapatkan perhatian sama sekali oleh masyarakat Islam. Dari sini kemudian terjadi dikotomi antara seorang agamis dan seorang politisi. “Seorang agamis,” tulis ulama yang kini bermukim di Qatar itu, “dilarang berkecimpung dalam masalah politik,” sebaliknya juga, “seorang politisi dilarang berkecimpung dalam masalah agama.”<sup>92</sup>

Hasan al-Banna sebagai salah satu tokoh pergerakan Islam yang memiliki pengaruh di Mesir, bahkan dunia Islam memiliki pemikiran dan praksis dalam kancan politik. Pemikiran politik Hasan al-Banna, setidaknya ada empat hal, yaitu : ‘*Urubah* (Arabisme), *Wathaniyah* (Patriotisme), *Qaumiyah* (Nasionalisme), dan ‘*Alamiyah* (Internasionalisme).

---

<sup>91</sup>AR. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah, dan Benturan Ideologi* (Hermawan Sulisty, ed, Jakarta:2004), h. 8.

<sup>92</sup>Yusuf Qardhawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwanul Muslimin (at-Tarbiyah al-Islamiyah wa Madrasah Hasan al-Banna-terj. Ghazali Mukri)* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), h. 97.



## 1. 'Urubah (Arabisme)

Arabisme memiliki tempat tersendiri dan peran yang berarti dalam dakwah Hasan al-Banna. Bangsa Arab adalah bangsa yang pertama kali menerima kedatangan Islam. Dia juga merupakan bangsa yang terpilih. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw, "Jika bangsa Arab hina, maka hina pulalah Islam." Arabisme menurut al-Banna adalah kesatuan bahasa. Ia berkata dalam Mukhtamar Kelima Ikhwan, "...Bahwa Ikhwanul Muslimin memaknai kata *al-Urubah* (Arabisme) sebagaimana yang diperkenalkan Rasulullah Saw:

أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ : لِأَنَّيَّ عَرَبِيٌّ ، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ ، وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

*Artinya : "Cintailah oleh kamu akan Arab karena tiga hal: karena aku orang Arab, Alquran berbahasa Arab dan pembicaraan ahli surga dengan bahasa Arab". (HR. At tabrani, al Hakim, al Baihaqi)*

Menurut al-Banna, Arab adalah umat Islam yang pertama, yang merupakan bangsa pilihan. Islam, menurutnya, tidak pernah bangkit tanpa bersatunya bangsa Arab. Batas-batas geografis dan pemetaan politis tidak pernah mengoyak makna kesatuan Arab dan Islam. Islam juga tumbuh pertama kali di tanah Arab, kemudian berkembang ke berbagai bangsa melalui orang-orang Arab. Kitabnya datang dengan bahasa Arab yang jelas, dan berbagai bangsa pun bersatu dengan namanya.<sup>93</sup>

Hasan al-Banna, menjelaskan bahwa bangsa-bangsa Arab yang membentang dari Teluk Persi sampai Maroko dan Mauritania di Lautan Atlantik, semuanya adalah bangsa Arab. Mereka dihimpun oleh akidah serta dipersatukan oleh bahasa dan teritorial yang satu. Tidak ada yang memisahkan dan

---

<sup>93</sup>Mustafa Manshur, *Prinsip dan Penyimpangan Gerakan Islam*, (Robbani Press. Jakarta), h. 44.

membatasinya. Menurut al-Banna, ketika beramal untuk Arab, berarti juga beramal untuk Islam dan untuk kebaikan dunia seisinya.<sup>94</sup>

Atas dasar ini, menurut Abdul Hamid al-Ghazali, dalam bukunya *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, kita dapat menyimpulkan beberapa unsur dari pemikiran al-Banna bahwa berbangga dengan Arabisme tidak termasuk fanatisme dan tidak berarti merendahkan pihak lain.<sup>95</sup> Arabisme dengan tujuan untuk membangkitkan Islam demi tersebarnya Islam adalah dibolehkan.

## 2. Wathaniyah (Patriotisme)

Banyak definisi tentang patriotisme. Ada yang menyebut sebagai kecintaan yang mendalam terhadap bangsa, negara dan tanah air. *“Man who have offered their life for their country, know that patriotism is not the fear of something, it is the love of something,”* demikian salah satu definisinya.

Dalam memaknai Wathaniyah (patriotisme), ada tiga arti yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna, yaitu: Pertama, Patriotisme Kerinduan (Cinta Tanah Air). Al-Banna berkata: *“Jika yang dimaksud dengan patriotisme oleh para penyerunya adalah cinta negeri ini, keterikatan padanya, kerinduan padanya, dan ikatan emosional dengannya, maka hal itu sudah tertanam secara alami dalam fitrah manusia di satu sisi, dan dianjurkan Islam di sisi lainnya.”* Kedua, Patriotisme Kemerdekaan dan Kehormatan (Kemerdekaan Negeri). Al-Banna berkata: *“Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah keharusan berjuang untuk membebaskan tanah air dari cengkeraman perampok imperialis, menyempurnakan kemerdekaannya, dan menanamkan kehormatan diri dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa, maka kami sepakat dengan mereka tentang itu.”* Ketiga, Patriotisme Kebangsaan (Kesatuan Bangsa). Al-Banna berkata: *“Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah mempererat ikatan antara anggota masyarakat suatu Negara dan membimbingnya ke arah*

---

<sup>94</sup>Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II (Majmu'ah ar-Rasail al-Imam as-Syahid Hasan al-Banna-terj. Anis Matta dkk)*, (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 167-168.

<sup>95</sup> Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan al-Banna (Haula Asasiyat al-Masyru' al-Islami Linahdhah al-Ummah-terj. Wahid Ahmadi & Jasiman)*, (Solo: Era Intermedia), h. 195.

memberdayakan ikatan itu untuk kepentingan bersama, maka kami pun sepakat dengan mereka.”

Patriotisme juga memiliki prinsip di mata Hasan al-Banna. Ia mengatakan: Suatu kekeliruan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin berputus asa terhadap kondisi negeri dan tanah airnya. Sesungguhnya kaum Muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi negara, habis-habisan berkhidmat untuknya, dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya. Dan anda tahu sampai batas mana mereka menegakkan prinsip patriotisme mereka, serta kemuliaan macam apa yang mereka inginkan bagi umatnya. Hanya saja, perbedaan prinsip antara kaum muslimin dengan kaum yang lainnya dari para penyeru patriotisme murni adalah bahwa asas patriotisme Islam adalah akidah Islamiyah.

Adapun tentang patriotisme Ikhwanul Muslimin, cukuplah bahwa mereka menyakini dengan kukuh bahwa sikap acuh terhadap sejenkal tanah yang ditinggali seorang muslim yang terampas merupakan tindakan kriminal yang tidak terampuni, hingga dapat mengembalikannya atau hancur dalam mempertahankannya. Tidak ada keselamatan bagi mereka dari siksa Allah kecuali dengan itu.”

Al-Banna juga mengkritik pandangan tentang patriotisme yang hanya berpikir untuk membebaskan regionalnya saja. Seperti dalam kasus masyarakat Barat yang lebih cenderung pada pembangunan unsur fisik dalam tatanan kehidupannya, ini tidak dikehendaki oleh Islam. Adapun kami, katanya:

Kami percaya bahwa di pundak setiap muslim terpikul amanah besar untuk mengorbankan seluruh jiwa, darah, dan hartanya demi membimbing umat manusia menuju cahaya Islam.” Dari sini, kita mendapatkan gambaran bahwa tujuan hidup seorang muslim tidaklah hanya dibatasi oleh region-region tertentu, akan tetapi dalam skala yang lebih luas adalah untuk seluruh umat manusia.

### 3. *Qaumiyah* (Nasionalisme)

Menurut Ensiklopedia Wikipedia, Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris "nation") dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut Hasan al-Banna ada tiga unsur nasionalisme,

yaitu: nasionalisme kejayaan, nasionalisme umat, dan berkata tidak pada nasionalisme *jahiliyah*.

Tentang nasionalisme kejayaan, Al-Banna mendukung nasionalisme yang berarti bahwa generasi penerus harus mengikuti jejak para pendahulunya dalam mencapai kejayaannya. Ini adalah maksud yang baik, menurutnya dan mendukung. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ فَخَيَّرْتُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيَّرْتُهُمْ فِي  
الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَيْهُوا وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِقَ فِيهِ وَتَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهِينِ  
الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ وَهَوْلَاءَ بِوَجْهِهِ

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Kalian akan mendapatkan manusia bagaikan barang tambang. Mereka yang pernah menjadi orang-orang yang terbaik pada masa jahiliah akan menjadi orang-orang yang terbaik pula masa Islam jika mereka memahaminya (ajaran Islam). Selain itu kalian juga akan menjumpai orang-orang yang tergolong baik, tapi dulunya sebelum masuk Islam mereka adalah orang-orang yang sangat membenci islam. Kalian juga akan menjumpai seburuk-buruknya manusia, yaitu orang yang bermuka dua, yang apabila datang ke satu kelompok dengan satu sikap dan bila datang pada kelompok lain dengan sikap yang lain." (HR. Muslim).

Menurutnya, jika yang dimaksud dengan nasionalisme adalah anggapan bahwa suatu kelompok etnis atau sebuah komunitas masyarakat adalah pihak yang paling berhak memperoleh kebaikan-kebaikan yang merupakan hasil perjuangannya, maka ia benar adanya. Jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme adalah bahwa setiap kita dituntut untuk bekerja dan berjuang, bahwa setiap kelompok harus mewujudkan tujuannya hingga kita bertemu dengan izin Allah di medan kemenangan, maka inilah pengelompokan terbaik. Semua makna nasionalisme ini adalah indah dan mengagumkan, tidak diingkari oleh Islam. Itulah tolak ukur terbaik menurut al-Banna.

Nasionalisme Islam bersumber dari hadits Nabi : “*Orang muslim itu saudara muslim yang lain.*” Sedangkan sabdanya yang lain mengatakan: “*Orang-*

*orang muslim itu satu darah, orang-orang yang berada di atas bekerja untuk menyantuni yang lain, dan mereka bersatu untuk melawan musuhnya.*”<sup>96</sup>

Ini berarti bahwa nasionalisme Islam tidak terbatas pada negara saja. Islam datang untuk menghapus budaya *jahiliyah*. Nasionalisme yang jahiliyah haruslah ditinggalkan oleh umat Islam. Ia berkata bahwa jika yang dimaksudkan dengan nasionalisme adalah menghidupkan tradisi jahiliyah yang sudah lapuk, menegakkan kembali peradaban yang telah terkubur dan digantikan oleh peradaban baru yang telah eksis dan bermanfaat, atau melepaskan dirinya dari ikatan Islam dengan klaim demi nasionalisme dan harga diri kebangsaan, maka pengertian nasionalisme seperti ini adalah buruk, hina akibatnya, dan jelek kesudahannya.

#### 4. ‘Alamiyah (Internasionalisme)

Allah Swt berfirman dalam Alquran Surat al-Anbiya ayat 107 :

لِّلْعَالَمِينَ رَحْمَةً إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(QS. al-Anbiya ayat 107).

Ayat ini berarti bahwa diutusnya nabi Muhammad Saw adalah ditujukan untuk seluruh umat manusia dari seluruh suku bangsa. ”*Rahmatan Lil’Alamin*” adalah konsep yang menjelaskan tentang internasionalisme Islam yang tidak mengenal sekat-sekat teritori.

Jika internasionalisme diterjemahkan dengan “Pemerintahan Dunia”, maka pengertiannya yang bisa diberikan adalah “Sebuah kesatuan pemerintahan dengan otoritas mencakup planet Bumi. Tidak pernah ada satu Pemerintahan Dunia yang

---

<sup>96</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin (Wasail a-Tarbiyah ‘inda Ikhwanil Muslimin (Dirasah Tahliliyah Tarikhiyah-terj. Wahid Ahmadi dkk)*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 44.

pernah terjadi sebelumnya, meskipun kerajaan besar dan *super power* telah mendapatkan tingkatan kekuasaan yang mirip. Contoh sejarah telah dihambat oleh kenyataan bahwa komunikasi dan perjalanan yang tak memungkinkan membuat organisasi dunia ini tidak terjadi. Beberapa internasionalis mencari pembentukan pemerintahan dunia sebagai cara mendapatkan kebebasan dan sebuah peraturan hukum di seluruh dunia. Beberapa orang khawatir bahwa pemerintah dunia harus dapat menghormati keragaman negara atau manusia yang tercakup di dalamnya di sisi lain memandang ide ini sebagai sebuah kemungkinan mimpi buruk, dalam dunia yang kacau pemerintah berusaha menciptakan negara totalitarian yang tak berakhir tanpa ada kemungkinan untuk kabur atau revolusi.<sup>97</sup>

Internasionalisme menurut Hasan al-Banna inheren dalam Islam, oleh karena Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. “Adapun dakwah kita disebut internasional, karena ia ditujukan kepada seluruh umat manusia. Manusia pada dasarnya bersaudara; asal mereka satu, bapak mereka satu, dan nasab mereka pun satu. Tidak ada keutamaan selain karena takwa dan karena amal yang dipersembhkannya, meliputi kebaikan dan keutamaan yang dapat dirasakan semuanya,” demikian tulisnya.

Konsep internasionalisme merupakan lingkaran terakhir dari proyek politik al-Banna dalam program *ishlahul ummah* (perbaikan umat). Dunia, tidak bisa tidak, bergerak mengarah ke sana. Persatuan antar bangsa, perhimpunan antar suku Arab, bersatunya sesama pihak yang lemah untuk memperoleh kekuatan, dan bergabungnya mereka yang terpisah untuk mendapatkan hangatnya persatuan, semua itu merupakan pengantar menuju terwujudnya kepemimpinan prinsip internasionalisme untuk menggantikan pemikiran rasialisme dan kesukuan yang diyakini umat manusia sebelum ini. Dahulu memang harus meyakini ini untuk menghimpun unsur-unsur dasar, lalu harus dilepaskan kemudian untuk menggabungkan berbagai kelompok besar, setelah itu terwujudlah kesatuan total di akhirnya. Langkah ini, menurutnya memang lambat, namun itu harus terjadi.

---

<sup>9797</sup> Hasan al-Banna, *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, “Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, cet. 15, (Solo: Era Intermedia, 2008), h. 170.

Untuk mewujudkan konsep ini juga Islam telah menyodorkan sebuah penyelesaian yang jelas bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran masalah seperti ini. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah dengan mengajak kepada kesatuan akidah, kemudian mewujudkan kesatuan amal. Hal itu sejalan dengan ayat dalam Alquran surat Asyura 13:

وَأَنَّ عِيسَىٰ وَمُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِهِ ءَوَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ ءَوَصَّيْنَا مَا أَلَدِينِ مِّنْ لَّكُمْ شَرْعٌ ﴿١٣﴾  
فِيهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمِ ﴿١٤﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa yaitu ‘Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.’”

Dalam Risalah Pergerakan, Hasan al-Banna berharap pada negerinya yaitu Mesir yang mendukung upaya dakwah Islamiyah, menyatukan seluruh bangsa Arab untuk kemudian melindungi seluruh kaum muslimin di penjuru bumi.<sup>98</sup> Namun, harapan ini tetaplah belum membuahkan hasil maksimal karena sejak Hasan al-Banna wafat sampai sekarang Mesir belum menjadi sentrum dari kesatuan umat Islam sedunia. Malah, pada beberapa kasus, seperti masalah invasi Israel ke Gaza Palestina (2009), Mesir banyak mendapat kecaman karena tidak kooperatif dengan aktivis pergerakan Islam namun dekat dan bahkan pada titik tertentu, mendapatkan intervensi dari Barat.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan*, h. 170.

<sup>99</sup> Zabir Rizq, Hasan al-Banna: *Dai, Murabbi, dan Pemimpin yang Mengabdikan (al-Imam Hasan al-Banna bil Aqlami Talamidzatihi wa Mu'ashirah-terj. Syarif Ridwan)*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2007), h. 170.

## B. Mendirikan Ikhwanul Muslimun

Setelah dakwah dari satu kedai kopi ke kedai yang lainnya berjalan optimal, berkunjunglah enam orang yang telah mendapatkan pengaruh dan sentuhan dari kajian-kajian serta ceramah yang disampaikan oleh Hasan Al Banna, mereka antara lain: Hafidz Abdul Hamid, Ahmad Al Hashari, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz, dan Zaki Al Maghribi<sup>100</sup>.

Mereka berkumpul dan mengungkapkan kegelisahannya terhadap realitas umat Islam yang terbelenggu, jauh dari kedudukan dan kemuliaan. Menjadi buruh di negerinya sendiri, dan dikuasai oleh penguasa asing yang menjajah negeri. Semuanya menyadari bahwa ada satu kewajiban seorang muslim yang tidak boleh luput di tengah ujian ini, yakni kewajiban untuk beramal. Setelah itu, terjadilah baiat, sumpah setia bahwa mereka akan hidup bersaudara, beramal untuk Islam dan berjihad di jalan-Nya. Hasan Al Banna mengusulkan perkumpulan ini

---

<sup>100</sup>Hasan Al Banna, *Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah*, (Era Adicitra Intermedia, 2013,hal. 104). Bandingkan dengan tulisan Hasan Al Banna dalam *Majmu'atur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna Jilid 1*, bab Risalah Muktamar Kelima yang diselenggarakan pada tanggal 13 Zulhijjah 1357 hijriyah atau pada bulan Desember 1938 masehi, pada halaman 177, ketika menceritakan sejarah berdirinya Ikhwanul Muslimun:

*“Yang paling cepat menyadari kewajiban beramal, dan paling bersemangat adalah Al Akh yang mulia Ahmad Afandi Sukri, Al Akh yang mulia almarhum Syaikh Hamid Askariyah rahimahullah, Al Akh Syaikh Ahmad Abdul Hamid, dan masih banyak lagi yang lain. Janji dan ikrar saat itu adalah bahwa masing-masing kami akan beramal untuk tujuan ini, sehingga kebiasaan umum dapat berubah sesuai cara pandang Islami yang benar.”*

penulis berpendapat, bahwa terjadinya perbedaan isi tulisan yang dikemukakan Hasan Al Banna dalam *Mudzakkiratud Da'wah Wad Da'iyah* dan *Majmu'atur Rasail* bukan sebuah persoalan yang rumit. menurut analisa penulis, telah terjadi beberapa pertemuan antara Hasan Al Banna dengan semua tokoh-tokoh yang sudah disebutkan di atas dalam waktu-waktu yang berbeda. Janji dan ikrar yang dimaksud Al Banna dalam *Majmu'atur Rasail* bukanlah ikrar pendirian Ikhwanul Muslimun. Sebab dalam halaman selanjutnya (halaman 179) dalam *Majmu'atur Rasail* Hasan Al Banna menuliskan sebagai berikut:

*“Waktu pun terus berjalan, dan kami berempat akhirnya berpencar. Ahmad Afandi Sukri di Mahraudiyyah, almarhum Syaikh Hamid Asykarriyah di Zaqaziq, Syaikh Ahmad Abdul Hamid di Kafr Dawwar, dan saya sendiri di Ismailiyah.”*

Barulah di Ismailiyah, Hasan Al Banna bertemu dengan enam orang yang disebut diatas, sebagaimana yang beliau ceritakan dalam *Majmu'atur Rasail* halaman 179-180:

*“Di Ismailiyah saya menanamkan benih-benih awal bagi fikrah ini. Setelah itu berdirilah sebuah perkumpulan yang sederhana, tempat di mana kami berbuat. Kami mengusung panjinya dan kami berjanji setia kepada Allah untuk melakukan ketaatan penuh dalam memperjuangkan risalah-Nya. Perkumpulan itu bernama Al Ikhwan Al Muslimun. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada bulan Zulqa'idah 1347 hijriyah.”*



bernama *Al Ikhwan Al Muslimun* dan disetujui oleh semuanya. *Al Ikhwan Al Muslimun* atau *Ikhwanul Muslimun* mengandung makna, “Saudara-saudara yang sama-sama muslim.”

Namun dalam perkembangan selanjutnya khususnya di Indonesia, jama’ah ini lebih populer dengan sebutan Ikhwanul Muslimin yang maknanya, “Saudara-saudaranya kaum muslimin.”

Ikhwanul Muslimun memiliki delapan karakteristik dakwah yang khas, seperti dijelaskan Hasan Al Banna<sup>101</sup>, yakni sebagaimana diterjemahkan:

1. *Ad-Da’wah as-Salafiyun*: Karena mereka mengajak kembali bersama Islam kepada sumbernya yang jernih dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.
2. *At-Thariqah as-Sunniah*: karena mereka membawa jiwanya untuk mengamalkan sunnah yang suci dalam segala hal, khususnya dalam masalah aqidah dan ibadah, selama ada kemampuan.
3. *Al-Haqiqah as-Shufiyyah*: karena mereka memahami bahwa asas kebaikan adalah kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, berpaling dari ketergantungan kepada makhluk, cinta karena Allah, dan keterikatan kepada kebaikan.
4. *Al-Hai’ah as-Siyaasiyyah*: karena secara internal mereka menuntut perbaikan pemerintahan, meluruskan persepsi yang terkait dengan hubungan umat Islam terhadap bangsa-bangsa lain di luar negeri, menarbiyah bangsa agar memiliki kebanggaan dan kemuliaan, serta menjaga nasionalisme sebisa mungkin.
5. *Al-Jamaa’atun ar-Riyaadhiyah*: karena mereka sangat memperhatikan fisik dan memahami benar bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Nabi Muhammad saw., bersabda, “*Sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu (untuk diperhatikan).*” Sesungguhnya, semua kewajiban dalam Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sempurna dan benar tanpa didukung fisik yang kuat. Salat, puasa, haji, dan zakat juga harus dilakukan dengan fisik yang dapat memikul beban pekerjaan, amal, dan perjuangan untuk mencari rezeki. Mereka juga memperhatikan struktur dan klub-klub olahraga yang dapat menandingi, bahkan terkadang mengungguli kebanyakan klub yang dikhususkan untuk olahraga fisik.
6. *Ar-Rabithah al-’ilmiyyah at-Tsaqaafi*: karena Islam menjadikan *thalabul ‘ilmii* sebagai kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan, karena majelis-majelis ikhwan pada dasarnya adalah tempat

---

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 192-195.

pengajaran dan peningkatan wawasan. Sedangkan lembaga-lembaganya adalah tempat untuk menarbiyah fisik, akal, dan ruh.

7. *As-Syarikatun al-Iqtishadiyah*: karena Islam sangat memperhatikan pengelolaan dan pendapatan kekayaan sebagaimana mestinya. Inilah yang disabdakan Rasulullah saw., “*Sebaik-baik harta adalah harta halal (yang dipegang) oleh seorang yang shalih.*” Rasulullah juga bersabda, “*Barangsiapa yang memasuki waktu sore dalam keadaan lelah karena bekerja, maka ia diampuni.*” Beliau juga bersabda, “*Sesungguhnya Allah menyukai seorang mukmin yang kreatif.*”
8. *Al-Fikrah al-ijtimaa’iyah*: karena mereka sangat menaruh perhatian pada segala penyakit yang ada dalam masyarakat Islam, dan berusaha menemukan cara pengobatan, dan mengupayakan penyembuhan umat darinya.

Kemudian dalam *risalah da’watunaa fi thaurin jadiid* yang dibuat setelah Perang Dunia kedua meletus, Hasan Al Banna merangkum kembali karakteristik dakwah Ikhwanul Muslimun menjadi *Rabbaniyatun ‘alamiyyatun* atau Rabbani dan universal. Prinsip Rabbani yang dimaksudkan oleh beliau adalah prinsip dasar yang melandasi seluruh tujuan gerakan, yakni agar manusia mengenal Tuhannya dan dari hubungan inilah mereka dapat meraih kekuatan ruhiyah yang sanggup membebaskan diri mereka dari belenggu kejumudan, hingga mencapai kesucian dan keindahan kemanusiaan. Sedangkan prinsip universal ialah karena ia ditujukan kepada semua manusia dengan prinsip bahwa semua manusia adalah saudara. Dengan demikian Ikhwanul Muslimun tidak mengakui rasisme dan tidak pula mendukung fanatisme terhadap ras dan warna kulit<sup>102</sup>.

Tujuan Ikhwanul Muslimun terbagi dua. Pertama, tujuan jangka pendek yang meliputi berperan aktif dalam medan kebajikan secara umum dan bakti sosial apapun bentuknya selama kondisi memungkinkan. Kedua, tujuan asasi yakni perubahan total dan integral yang melibatkan semua unsur kekuatan umat, saling bahu membahu, bersatu padu untuk menghadapi dan mengadakan perubahan secara total yakni menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 6-8.

<sup>103</sup>*Ibid.*, h. 170.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Ikhwanul Muslimun meliputi berbagai hal, mula-mula berkecimpung dalam dunia pendidikan, pelayanan sosial, kegiatan-kegiatan olahraga, keagamaan, hingga berpolitik. Namun Hasan Al Banna menolak apabila dikatakan Ikhwanul Muslimun itu sebagai lembaga politik, yayasan sosial, ataupun sebagai perkumpulan olahraga. Meskipun ia mengakui bahwa politik yang berlandaskan kaidah Islam merupakan intisari fikrah mereka, kerja sosial dan perbaikan merupakan bagian terbesar tujuan mereka, dan olahraga menjadi salah satu perangkat terpenting mereka. Hasan Al Banna menyebutkan bahwa Ikhwanul Muslimun adalah fikrah yang menyeluruh, sebagaimana diterjemahkan:

Kami adalah pemikiran dan aqidah, sistim dan manhaj, yang tidak dibatasi oleh tempat, tidak diikat oleh jenis suku bangsa, tidak terhalangi oleh batas geografis, dan tidak berhenti hingga Allah mewarisi bumi beserta segala isinya<sup>104</sup>.

Dengan kata lain, sejak awal berdirinya, Ikhwanul Muslimin telah menjadi pergerakan yang terbuka bagi setiap umat Islam di manapun berada, tanpa memandang suku bangsa dan negara. Mengenai hal ini, Hasan Al Banna menuliskan dalam risalah *da'watunna* sebagaimana diterjemahkan:

Kami tidak meminta sesuatu pun dari manusia, tidak mengharap harta, tidak menuntut balasan, tidak menginginkan popularitas, dan tidak menghendaki imbalan serta ucapan terimakasih. Sungguh, pahala kami hanyalah dari Dzat yang telah menciptakan kami.

Kami ingin agar umat mengetahui bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Sungguh, jiwa-jiwa kami ini senang gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau melayang untuk membayar kejayaan, kemuliaan, agama, dan cita-cita mereka, jika memang mencukupi.

Tiada yang membawa kami pada sikap seperti ini kepada mereka, kecuali karena rasa kasih sayang yang telah mencengkeram hati kami, menguasai perasaan kami, menghilangkan kantuk kami, dan mengalir air mata kami. Sungguh, kami benar-benar sedih melihat apa yang menimpa umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan, rida pada kerendahan, dan pasrah pada keputusan.

---

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 337.

Sungguh, kami berbuat di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia, lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik kalian wahai saudara-saudara tercinta, bukan untuk orang lain. Sesaat pun kami tidak akan pernah menjadi musuh kalian<sup>105</sup>.

Meskipun gerakan dakwah ini didirikan di negeri Mesir, secara tegas Hasan Al Banna mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimun tidak mengkhususkan dakwah untuk salah satu negeri Islam saja, tetapi mereka juga menyampaikan dakwah sebagai seruan yang diharapkan sampai ke telinga para pemimpin dan penguasa di negara-negara yang rakyatnya memeluk agama Islam<sup>106</sup>.

Melalui pergerakan Ikhwanul Muslimun inilah, Hasan Al Banna menuangkan pemikiran-pemikirannya.

### **C. Pengaruh Pemikiran Hasan Al Banna Tentang Sistem Pemerintahan dan Khilafah**

Hasan Al Banna berpendapat, sesungguhnya dalam Islam ada politik, namun isinya adalah kebahagiaan dunia dan kebaikan akhirat<sup>107</sup>. Selain ia menolak anggapan bahwa Islam tidak membahas masalah politik dan mengatakan bahwa orang-orang yang berkata seperti itu telah menzalimi diri sendiri dan pengetahuannya terhadap Islam. Kesalahan kaum muslimin pada saat ini adalah melupakan Islam dan memisahkan urusan agama dari politik, walaupun secara teori Hasan Al Banna tidak bisa memungkiri bahwa undang-undang yang ada (dalam hal ini undang-undang Mesir) menegaskan bahwa agama resmi negara adalah Islam.

Diantara teori politik yang dikembangkan oleh Hasan Al banna adalah teori politik bagi ahli sunnah sebagaimana diungkap Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris yaitu ketika menyatakan dengan sangat tegas bahwa seorang pejabat dalam pemerintah Islam jika tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mendengarkan nasehat-nasehat dari *ahlul hali wal Aqdi* dan tidak mendengarkan

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, h. 14-15.

<sup>106</sup>*Ibid.*, h. 42.

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 15.

seruan untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangannya maka pejabat itu harus dicopot.<sup>108</sup>

Pada awalnya, gerakan Ikhwanul Muslimun tidak langsung terjun ke dalam politik praktis di Mesir waktu itu. perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Hasan Al Banna dan gerakannya, terfokus untuk perbaikan kultural, demikian *marhalah* (tahapan) dakwah yang dilakukan, hingga setelah masyarakat dapat dikondisikan, dan anggota-anggotanya telah memahami dengan sebaik-baiknya tujuan gerakan ini, Hasan Al Banna mengumumkan secara resmi pada muktamar keenam Ikhwanul Muslimin pada bulan Zulhijjah 1361 hijriyah atau bulan Januari 1941 masehi, bahwa Ikhwanul Muslimun ikut serta dalam pemilihan umum anggota parlemen. Melalui Ikhwanul Muslimun, Hasan al Banna mengatakan:

Sudah seharusnya bagi ikhwan untuk menggetarkan mimbar perlemben dengan para orator dan dai'i-da'inya. Tujuannya agar mereka bisa menyuarakan dakwah secara lantang dari atasnya, agar dakwah mereka bisa sampai kepada para wakil umat Islam dalam lingkup resmi dan terbatas setelah sebelumnya dakwah mereka sudah berkembang dan sampai kepada umat itu sendiri dalam lingkup masyarakat umum. Oleh karena itu, Maktab Al Irsyad Al 'Am memutuskan agar ikhwan ikut dalam pemilihan umum anggota parlemen.<sup>109</sup>

Hasan Al Banna kemudian terpilih menjadi calon anggota legislatif pada pemilihan umum 1942, namun atas tekanan Inggris, An Nahhas Pasha meminta beliau mengundurkan diri dari pencalonan. Hasan Al Banna menyetujuinya setelah ada kesepakatan dengan An Nahhas tentang penghapusan prostitusi ilegal, kewajiban menggunakan bahasa Arab di seluruh perusahaan, mengizinkan ikhwan untuk melakukan aktivitasnya kembali serta menerbitkan surat kabar untuk kalangan internal. Pada masa pemerintahan Ahmad Mahir, Hasan Al Banna terpilih menjadi calon anggota parlemen kembali.

---

<sup>108</sup>Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan Al Banna*, (Media Insani Publishing, 2011), h. 61.

<sup>109</sup>Lampiran Ikhwan dan Pemilihan Umum, dalam Hasan Al Banna, *Majmu'atur Rasail Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna Jilid 4*, (Al I'tishom, 2013), h. 174.

Terjunnya Hasan Al Banna ke dalam politik praktis melahirkan komentar-komentar negatif, beliau kemudian menulis sebuah risalah yang diberi judul *Risalatul Ikhwani wal intikhabats* (Risalah Ikhwan dan Pemilihan Umum). Beliau menjelaskan pemikirannya kepada *Hai'ah Ta'sisiyah* (Dewan Pendiri Ikhwan). Dalam penjelasannya, beliau menyebutkan alasan orang yang menginginkan agar ikhwan ikut dalam pemilihan umum dan alasan orang yang tidak menginginkan ikhwan terlibat dalam pemilihan umum. Setelah itu, *Hai'ah Ta'sisiyah* memutuskan agar ikhwan masuk dan terlibat dalam pemilihan umum.

Ketika Hasan Al Banna menyatakan Islam sebagai solusi, ia tidak menganggap sistem pemerintahan di negara-negara saat ini bukan negara Islam, namun menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa telah banyak terjadi penyimpangan yang sangat serius terhadap Islam dan undang-undangnya. Sehingga ia terdorong dan berupaya untuk memperbaikinya<sup>110</sup>.

Dalam risalah *Nahwanuur* (Menuju Cahaya) yang Hasan Al Banna tulis untuk Raja Faruq dan perdana menteri Mesir saat itu Mustafa Nahhas Pasha, ia menjelaskan secara panjang lebar mengenai keunggulan sistem Islam yang dapat diringkas sebagai berikut. Islam sebagai solusi dari perbaikan pemerintahan, dan menjadi ruh yang menggerakkannya, karena Islam dapat membangkitkan kebanggaan dan kecintaan umat pada tanah airnya, menjalin persatuan yang selama ini tercelaiberaikan oleh berbagai perbedaan pendapat. Islam dapat melahirkan rasa patriotisme di dalam jiwa masyarakatnya.

Yang dimaksud pemerintahan dalam Islam, menurut Hasan Al Banna dalam *Risalah Nizamul Hukama*:

Islam yang hanif ini mengharuskan pemerintahannya menjadi salah satu penegak dari beberapa penegak sistem sosial yang hadir untuk umat manusia. Islam tidak mentolelir kekacauan, dan tidak membiarkan umat hidup tanpa pemimpin. Rasulullah saw., bersabda kepada sahabatnya, “Jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkan negeri itu.” dalam hadits lain, Rasul bersabda, “Jika kalian bertiga, angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin.”<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>Amer Syamakh, *Al Ikhwan Al Muslimun Siapa Kami dan Apa yang Kami Inginkan*, (Era Adi Citra Intermedia, 2011), h. 63.

<sup>111</sup>*Ibid.*, h. 69.

Ia menyitir kalimat Imam Al Ghazali, “*Ketahuilah bahwa syariat itu pondasi, dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada pondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang.*”

Ada tiga tiang penyangga pemerintahan dalam Islam menurut Hasan Al Banna :

*Pertama, mas’uliyatul haakimi* (tanggung jawab pemerintah) dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya, ia adalah pelayan dan pekerja bagi rakyat yang menjadi tuannya.

*Kedua, Wahdatul ummati* (kesatuan masyarakat) dalam hal ini umat Islam adalah umat yang satu karena ukhuwah adalah salah satu landasan iman, bagi umat Islam tidak ada perbedaan dalam hal-hal prinsip, sementara perbedaan dalam hal-hal *furu’* tidaklah membahayakan.

*Ketiga, ihtiraamu iradatil ummati* (menghormati aspirasi masyarakat) karena diantara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik.<sup>112</sup>

Sistem Islam dalam makna ini, menurut Hasan Al Banna tidak mementingkan bentuk atau nama, selama kaidah-kaidah pokok tadi terwujudkan, di mana tidak mungkin suatu hukum akan tegak tanpanya, dan selama diterapkan secara tepat hingga dapat menjaga keseimbangan satu sama lain. Beliau memberikan contoh bahwa sistem ini pernah terwujud sempurna pada masa *Khulafaur Rasyidin*.

Hasan Al Banna tidak mempermasalahkan sistem pemerintahan, apakah itu sistem parlementer (*wizaaratut tafwiidh*) ataukah sistem presidensial (*wizaratut tanfiidz*) selama sistem tersebut sanggup memikul tugas-tugas yang disyariatkan oleh Islam.

Mengenai Khilafah, Hasan Al Banna berpendapat Khilafah adalah lambing kesatuan Islam dan bukti adanya keterikatan antarbangsa muslim. Ia merupakan identitas Islam yang wajib dipikirkan dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Khalifah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan sebagian besar hukum dalam

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 74.

agama Islam. Oleh karena itu para sahabat lebih mendahulukan penanganannya daripada mengurus dan memakamkan jenazah Nabi saw., sampai mereka benar-benar menyelesaikan tugas tersebut.<sup>113</sup> Bahkan, melalui Ikhwanul Muslimun, Hasan Al Banna menjadikan upaya untuk mengembalikan eksistensi khilafah sebagai agenda utama dalam manhajnya.

Ustadz Rapping Samuddin memberikan penjelasan yang ringkas mengenai alasan, “Para sahabat lebih mendahulukan penanganannya daripada mengurus dan memakamkan jenazah Nabi saw.,” Lebih lanjut ia mengajukan dua alasan:

*Pertama*, Perlu diketahui bahwa di antara aturan politik yang mengakar dalam masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi, pengangkatan pemimpin dalam setiap kabilah atau jama’ah yang disebut sebagai Al Sayyid atau Syaikh Kabilah, yang bertugas menjaga persatuan, mengatur utusan mereka, memimpin perang, menyambut utusan (duta), mengikat perjanjian damai dan selainnya, hingga jika mereka wafat secara otomatis berpindah pada orang lain yang menggantikan posisinya. Perhatian besar dalam hal mengangkat pemimpin yang akan mengurus persoalan-persoalan Manusia yang ada pada aturan politik bangsa Arab sebelum kenabian tersebut, mendapat perhatian besar dari Nabi saw., yang kemudian disaksikan oleh para sahabat tatkala negara Islam tegak di kota Madinah. Nabi saw., senantiasa menunjuk seseorang sebagai pemimpin dalam setiap pengiriman pasukan-pasukan kecil kendati jumlah mereka sedikit serta waktu keluarnya sangat pendek. Bahkan, tatkala beliau khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap pasukan kaum muslimin dalam perang Mut’ah, beliau lantas mempersiapkan tiga nama yang bakal saling menggantikan dalam kepemimpinan.

Demikian pula, beliau tidak pernah meninggalkan Madinah melainkan setelah menunjuk salah seorang yang mewakili beliau untuk sementara waktu sebagai pemimpin. Semisal perhatian akan pengaturan politik tersebut dilakukan oleh Rasulullah saw., dalam negara Islam, dalam kondisi-kondisi yang mungkin saja bukan darurat, menguatkan dalam benak para sahabat akan kewajiban untuk bersegera dalam persoalan yang dikategorikan urusan paling mendesak dan

---

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 259.



darurat dalam sebuah negara yang baru terbentuk, yaitu menegakkan dan mengangkat pemimpin kaum muslimin pada saat wafatnya Nabi saw.

*Kedua*, kondisi kota Madinah saat itu tidak dalam keadaan aman. Ketika Rasulullah saw., wafat, banyak orang murtad, Yahudi dan Nasrani mulai menggeliat dan mencari kesempatan berperang, kemunafikan mulai tampak. Jadi untuk menjaga masalah agama, negara, serta kaum muslimin dari berbagai ancaman dan makar-makar musuh Islam disegerakan memilih pemimpin.<sup>114</sup>

Adapun mengenai langkah-langkah untuk mengembalikan eksistensi khilafah, selain yang tertera dalam *maratibul 'amal*, Hasan Al Banna kembali meringkasnya menjadi tiga poin penting, yaitu:

1. Harus ada kerja sama yang sempurna antara bangsa-bangsa muslim, menyangkut masalah wawasan, sosial, dan ekonomi.
2. Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi, serta menyelenggarakan berbagai pertemuan dan muktamar di antara negara-negara tersebut.
3. Setelah itu membentuk persekutuan bangsa-bangsa muslim. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna, akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat pemimpin yang satu, di mana ia merupakan penengah, pemersatu, penentram hati, dalam naungan Allah di muka bumi.<sup>115</sup>

#### **D.Hasan Al-Banna dan Teori *Maslahat***

Dalam empat pemikiran politik Hasan al-Banna diatas, kita menemukan bahwa kemaslahatan sangat ditekankan oleh al-Banna. Ini didasarkan oleh tafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran yang menghendaki umat Islam untuk tampil ke muka bumi sebagai khalifah untuk menciptakan masyarakat yang ber-

---

<sup>114</sup>Rappung Samudin, *Fiqih Demokrasi*, (Gozian Press, 2013), h. 92.

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 260-261.

Tauhid Islam.<sup>116</sup> Dengan demikian, segala hal yang bisa mendatangkan kebaikan, itu dibolehkan dalam agama.

Hasan al-Banna meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang universal. Menurutnya, “Islam adalah agama dan sistem kehidupan yang utuh sekaligus memuat di dalamnya aspek politik.” Islam, menurutnya, adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan.<sup>117</sup> Tokoh Islam dari Mesir itu berkata, “Sebagai hasil pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap Islam dalam diri Ikhwanul Muslimin ini, fikrah mereka melingkupi seluruh perbaikan masyarakat dan tercermin di dalamnya setiap unsur dari berbagai pemikiran dalam rangka perbaikan (maslahat).”

Dari kutipan di atas kita melihat bahwa faktor kemaslahatan menjadi perhatian penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Konsep ‘*Urubah* (Arabisme) yang dikemukakannya adalah karena dalam sebagai muslim, ia berpatokan pada ketentuan dalam Alquran dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Konsep ini dilontarkan olehnya karena melihat secara faktual bahwa orang Arab adalah bangsa pilihan tempat diturunkannya para nabi dan Alquran dalam bahasa Arab. Dengan demikian, siapapun kaum muslim yang ingin mempertahankan Islam patut memberikan penghargaan kepada bangsa Arab, dalam batas-batas yang tidak keluar dari ajaran Islam. Lebih jauh dalam masalah Arab ini, ke-Araban juga tidak dimaknai semata sebagai sebuah suku di daerah Arab, akan tetapi secara umum umat Islam yang juga mempelajari bahasa Arab. Hadits Nabi tentang “*Ingatlah, sesungguhnya Arab itu bahasa. Ingatlah, bahwa Arab itu bahasa*”, bermakna bahwa siapapun umat Islam yang mempelajari Alquran yang notabene berbahasa Arab, termasuk dalam Islam yang perlu membela Arab.

“Jika bangsa Arab hina, hina pulalah Islam, “ yang dikemukakan oleh al-Banna semata karena penghargaannya kepada bangsa Arab yang telah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.

---

<sup>116</sup>Tijani Abd. Qadir Hamid, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an (al-Ushul al-Fikri al-Siyasi fi al-Qur'an al-Makki-terj. Abdul Hayyie al-Kattani)*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 22.

<sup>117</sup>Hasan al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, h. 66.

Dalam hal *Wathaniyah* (Patriotisme), kerinduan akan tanah air tempat manusia dibesarkan adalah sesuatu yang alamiah dalam fitrah manusia. Artinya, kecintaan pada negeri sendiri adalah bagian dari kepedulian umat Islam terhadap lingkungannya. Tujuan utama dari patriotisme ini, menurut al-Banna adalah untuk membimbing umat manusia menuju cahaya Islam, lain dari itu (seperti hanya mementingkan aspek-aspek fisik di Eropa), bertentangan dengan Islam. Dilihat dari kacamata Ibnu Qayyim, cinta pada negeri demi kemaslahatan negeri itu sendiri, termasuk dalam agama.

Dalam membahas *Qaumiyah* (Nasionalisme), al-Banna menfokuskan pada sikap loyal (*wala'*) pada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Dalil yang dikemukakannya, salah satunya adalah :<sup>118</sup>

رَجَوْنَهُمُ الطَّغُوتِ أَوْلِيَاءُ هُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ صَلُّوا إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ مِنْ يَخْرُجُهُمْ أَمَنُوا الَّذِينَ وَلى اللهُ

خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ الظُّلْمَةِ إِلَى النُّورِ مِنْ يَخْرُجُونَ

Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah:257).

Dengan demikian, jika ada orang-orang beriman yang berjuang untuk kemajuan negerinya agar dakwah Islamiyah berkembang, maka itu termasuk dalam perlindungan Allah. Nasionalisme ala al-Banna juga memosisikan diri secara diametral dengan nasionalisme ala Jahiliyah yang sarat dengan muatan pengagungan nenek moyang tanpa dalil yang pasti atau untuk menanamkan rasa bangga pada jiwa anak-anaknya.

---

<sup>118</sup> Hasan al-Banna, *Majmū'ah al-Rasā'il al-Imām al-Syahīd Hasan al-Banna*, terj. Anis Matta dkk, "Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, cet. 15, (Solo: Era Intermedia, 2008), h. 43.

Nasionalisme Islam menurut al-Banna mengandung kemaslahatan karena membawa manusia agar meninggalkan fanatisme buta pada nenek moyang menuju penghambaan kepada Allah. Paganisme yang ada pada peradaban sebelum Islam yang kemudian berkembang dalam banyak bentuk juga ditentang oleh al-Banna. Menjadikan patung-patung, bahkan ideologi hasil pemikiran manusia sebagai sesuatu yang harus diikuti ketimbang dalil dari Alquran dan Sunnah nabi juga ditentang. Al-Banna berkehendak menciptakan umat Islam yang menjalankan seluruh kehidupannya secara *kaaffah* (menyeluruh) dalam bingkai Islam dan, ini termasuk dalam kemaslahatan umat manusia.

Pandangan ‘*Alamiyah* (Internasionalisme) adalah berdasarkan pada dalil bahwa umat Islam dikeluarkan untuk menjadi “*khairu ummah*” (umat terbaik) yang Allah utus kepada manusia agar menjalankan kaidah menyeru kepada kebenaran dan mencegah pada yang mungkar. Rasulullah Saw juga diutus Allah untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil ‘alamin). Dari perspektif ini, dakwah al-Banna berpatokan pada persaudaraan seluruh umat manusia. Dalil yang diambil oleh al-Banna berladaskan pada ayat :

أَوْنِسَاءَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَافَهُوا

رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّاءَ رَحَامٍ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1).

Kemaslahatan internasionalisme ini sekilas memiliki kesamaan dengan konsepsi kaum Zionis yang berupaya menciptakan pemerintahan satu dunia. Akan tetapi, Zionisme lebih menitikberatkan pada penguasaan kaum Yahudi atas

kalangan *goyyim* (non-Yahudi) dengan memperlakukannya sebagai budak. Persaudaraan umat sedunia yang diinginkan oleh al-Banna, adalah karena umat manusia berasal dari satu nenek moyang yaitu Adam as. Selanjutnya, dalam dakwah menuju persaudaraan internasional, harus dijalankan berdasarkan fondasi nilai yang adil dan tidak diskriminatif.<sup>119</sup> Dari sinilah kelak ada mekanisme *take and give* antar peradaban umat manusia. Unsur kerjasama demi kemaslahatan bersama sangat ditekankan oleh Hasan al-Banna.

Jadi, dilihat dari konsepsi Ibnu Qayyim tentang kemaslahatan, maka pemikiran politik Hasan al-Banna lebih menitikberatkan pada kemaslahatan umat Islam dan umat manusia.

#### **E. Pengaruh Pemikiran Hasan al-Banna dalam Pergerakan Ikhwânul Muslimin di Mesir**

Dalam dunia politik kontemporer, banyak para ahli yang meyakini bahwa politik dan keyakinan (kepercayaan) adalah hal yang terpisah dan tidak ada lagi yang menerapkannya dalam bernegara. Namun di abad ini masih tumbuh gerakan-gerakan yang besar, kokoh dan berpegaruh yang berdasarkan kepada keyakinan akan Tuhan untuk membangun sebuah negara yang baik. Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu gerakan Islam terbesar yang terorganisir dan berpengaruh di Mesir, di Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan berpengaruh diberbagai belahan dunia.

Ikhwanul Muslimin meyakini bahwa Islam bukanlah sekedar agama yang menuntut keyakinan dan rangkaian kegiatan-kegiatan ibadah semata, akan tetapi Islam adalah solusi untuk semua hal. IM menekankan bahwa Islam adalah ideologi yang menyeluruh (*comprehensive*) untuk kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, serta sebagai landasan membangun masyarakat dan negara Islam.<sup>120</sup> Hassan Albanna pendiri IM menyebutkan bahwa : “ *Islam adalah aqidah*

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, h. 116.

<sup>120</sup> Sana Abed-Kotob. *The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt*. *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 27, No. 3 (Aug., 1995), h. 323.

*dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan”<sup>121</sup>*

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam yang didirikan atas dasar keinginan untuk menyatukan umat Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Hasan Al-Banna mendirikan organisasi ini tahun 1928 untuk merangkul masyarakat Mesir agar kembali menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan dan berupaya membentengi kebudayaan barat yang berkembang di Mesir. Tahun 1952, Ikhwanul Muslimin bergabung dengan militer Mesir dan berhasil menggulingkan raja Farouq yang dinilai sudah menjadi boneka kerajaan Inggris. Ikhwanul Muslimin tumbuh membangun Mesir bersama militer hingga terjadi perselisihan dengan Gamal Abdul Naser yang menilai gerakan keagamaan mengancam stabilitas nasional. Ikhwanul Muslimin dibubarkan dari di Mesir dan menyebar diberbagai kawasan Timur Tengah.

Setelah meninggalnya Gamal Abdul Naser, Anwar sadat yang menggantikan posisi presiden mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas pemerintahannya akibat pengaruh komunis. Sadat membebaskan anggota-anggota IM yang ditahan selama pemerintahan Sadat dan memanggil pemimpin Ikhwanul Muslimin yang berada di luar negeri. Sadat memanfaatkan organisasi ini untuk mendapatkan dukungan dan menekan perkembangan komunis.<sup>122</sup> Namun situasi ekonomi Mesir yang tidak stabil akibat berperangan yang berkelanjutan dengan Israel menjadi beban pemerintahan Sadat. Untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tersebut, Sadat memilih mengikuti diplomasi yang dilakukan AS untuk mengakhiri perang dengan Israel dan menyepakati perjanjian damai dengan Israel tahun 1978 dan 1979. Hasil dari kesepakatan tersebut memberikan Mesir atas hak milik Sinai dan Mesir menerima bantuan militer serta ekonomi berkelanjutan dari AS. Namun konsekuensi dari tindakan tersebut, Mesir dikucilkan dari dunia Arab dan kehilangan pengaruh dikawasan Timur Tengah. Gerakan-gerakan ekstrimis pun bermunculan yang berujung pada pembunuhan Anwar Sadat. Tahun

---

<sup>121</sup>Hasan Al-Banna. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2* (Surakarta: 2012), h. 67.

<sup>122</sup> Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner. *Modern Islamic Reform Movements: The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt*. Middle East Journal, Vol. 36, No. 3 (Summer, 1982), h. 348.

1981, Husni Mubarak memimpin Mesir dengan menjalankan apa yang telah dimulai oleh pendahulunya, Sadat. Ikhwanul Muslimin dibiarkan berkembang namun tetap dianggap sebagai organisasi ilegal.<sup>123</sup>

Kebijakan luar negeri Mubarak tunduk pada kepentingan AS di Timur Tengah. Kebijakan yang dikeluarkan Mubarak cenderung menguntungkan AS dan sekutunya Israel. Sebagai negara Arab dan mayoritas muslim, Mesir tidak lagi menjalankan perannya dengan semestinya. Kebijakan terhadap kawasan Afrika hanya untuk mengambil keuntungan dari Sungai Nil dan menolak untuk membicarakan pembagian secara adil. Hubungan Mesir-Afrika tidak baik selama rezim Mubarak. Meskipun terjadi banyak tuntutan dari kelompok-kelompok masyarakat, Mubarak tidak memberikan lawan politiknya untuk tampil menyainginya. Kelompok Ikhwanul Muslimin terus mengawalinya dari parlemen. Dengan alasan keamanan dan stabilitas negara, Mubarak selalu membubarkan parlemen jika tidak mendukung pemerintah. Meskipun ilegal, aktifitas gerakan IM tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kecil melalui kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Setelah 30 tahun rezim Mubarak bertahan, negara-negara Arab dilanda gelombang protes terhadap pemerintah-pemerintah. Demonstrasi pertama terjadi di Tunisia, menuntut mundur rezim Ben Ali menjadi pememicu semangat rakyat Mesir menyuarkan tuntutan untuk mengakhiri rezim Mubarak. Desakan yang besar memaksa Mubarak untuk meletakkan jabatannya pada tanggal 11 Februari 2011.<sup>124</sup>

30 April 2011, IM mendirikan partai *Freedom and Justice Party* (FJP) sebagai sayap politik untuk mengikuti pemilihan parlemen Desember 2011-Januari 2012. IM berhasil memenangkan 47,2 % suara dan diikuti oleh partai An-Nour yang berafiliasi dengan kelompok Salafi 24,22% suara. Kemenangan FJP dan An-Nour menjadikan parlemen Mesir didominasi oleh kelompok Islam. Muhammad Mursi yang diusung Ikhwanul Muslimin dan Partai An-Nour

---

<sup>123</sup>Rizfa Amalia. *Kebijakan-Kebijakan Hosni Mubarak Di Mesir (1981-2011)*, Skripsi UI Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (Depok: 2012), h. 26.

<sup>124</sup>SitaHidriyah. Terpilihnya Muhammad MursidanBabakBaruDemokrasi di Mesir. Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. IV, No. 13/I/P3DI/Juli/2012.

memenangkan pemilihan presiden pada bulan Juni 2012. Setelah terpilihnya Mursi sebagai presiden baru Mesir secara demokratis, Mursi mulai melakukan pergeseran pola politik luar negeri Mesir, terutama dengan negara Inggris, Amerika, dan Israel.<sup>125</sup>

Pergerakan Ikhwanul Muslimin merupakan jawaban dari kondisi masyarakat Mesir di bawah pemimpin yang pro-barat, terutama dalam aspek sosial, pendidikan, dan agama. Sehingga pergerakannya pun bukan hanya berpusat di kalangan bawah (masyarakat), tetapi Ikhwanul Muslimin juga ikut andil dalam perpolitikan Mesir dan puncaknya ketika aktivis Ikhwan berhasil menjadi presiden Mesir yang dipilih secara demokratis yakni Muhammad Mursi. Dengan menguasai pemerintahan pusat maka Ikhwanul Muslimin akan lebih mudah dalam mensyi'arkan dakwah Islam dan akan lebih mudah mewujudkan cita-cita Ikhwanul Muslimin, yaitu mengembalikan identitas politik dan ekonomi sosial masyarakat Muslim agar sejalan dengan nilai-nilai etika Islam.

### *1. Ikhwanul Muslimin Di Era Husni Mubarak*

Ikhwanul Muslimin memiliki peranan yang signifikan di Mesir bahkan di luar negeri. Kelompok Islam moderat ini berkecimpung tidak hanya dalam bidang agama, namun juga ikut serta dalam bidang politik. Meskipun secara teoritis nasionalisme dan Islam seharusnya terpisah, Ikhwanul Muslimin mampu menjalankannya secara bersamaan. Kehadiran Ikhwanul Muslimin membuat Hosni Mubarak resah. Kegiatan-kegiatannya dianggap mengancam kekuasaan Mubarak di Mesir. Berbagai kebijakan juga dilakukan terhadap kelompok Islam moderat tersebut.

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi agama Islam yang religius dengan tujuan menyebarkan Islam dan berakhlak yang mulia. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna di Mesir pada 1928. Sejak organisasi ini berdiri, sasarannya adalah sosial dan politik, namun tetap berbasis Islam. Hasan Al Banna adalah pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia lahir pada Oktober 1906 di

---

<sup>125</sup>*Ibid.*



Buhairah, timr laut Kairo. Ayahnya seorang imam dan pengajar di masjid. Ketika berumur belasan tahun, dia mulai mempelajari sufi, mengajar, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Gabungan dari berbagai pengaruh, mulai dari sufisme, pemikiran Muhammad Rashid Ridha dan gerakan Salafiyah, nasionalisme hingga ajaran dari ajaran ayahnya, membuat Al-Banna membuat sebuah pemikirannya sendiri. Sewaktu menjadi seorang pengajar, dia banyak bergaul dengan masyarakat setempat. Pada 1927, Al-Banna mendukung berdirinya Ikatan Pemuda Muslim di Kairo dan pada tahun 1928, dia mendirikan jamaahnya sendiri yang bernama Ikhwanul Muslimin. Dia terbunuh oleh polisi pada 12 Februari 1949.<sup>126</sup>

Dalam pergerakannya, Ikhwanul Muslimin menggunakan konsep ketaatan kepada pemimpin dan pola organisasinya yang ketat yang menghubungkan pimpinan tertinggi sampai satuan terkecil, seperti keluarga.<sup>127</sup> Organisasi ini juga mencakup hubungan yang cukup luas, mulai dari teknis dan komite maupun dewan penasihat. Ikhwanul Muslimin telah memiliki lebih dari 300 cabang yang menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Ikhwanul Muslimin juga mendirikan pabrik, perusahaan, sekolah, dan rumah sakit sendiri.

Ikhwanul Muslimin memiliki daya tarik yang kuat. Banyak kalangan masyarakat Mesir yang mendukung mereka, mulai dari guru besar, mahasiswa, dokter, pengacara sampai kaum professional lainnya. Meskipun pemerintahan melarang dan menyatakan tidak sah, organisasi ini tetap diterima secara *de facto*. Ikhwanul Muslimin juga mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kelompok-kelompok Islam secara umum mampu memperoleh legitimasi dan pengaruh positif yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan misinya, Ikhwanul Muslimin bekerja melalui organisasi-organisasi sah yang ada di Mesir.

Pada saat Mubarak sibuk menumpas kelompok Islam radikal, Ikhwanul Muslimin memosisikan diri mereka menjadi sebuah kekuatan politik alternatif

---

<sup>126</sup>Abd al-Monein Said Aly and Manfred W. Wenner. *Op. Cit*, h. 337.

<sup>127</sup>Michael Judy. *The muslim Brother and the Theat to U.S. National Security-The Movement*. (Global Scurity Studies, Vol.2, Issu.4, Tahun 2011), h. 38.

dan bersuara moderat. Ikhwanul Muslimin memang menjadi pihak yang diuntungkan dalam permasalahan tersebut, namun dia juga tidak bisa luput dari kecaman pemerintahan Mubarak. Akan tetapi, meskipun Mubarak berusaha menumpas mereka, hal itu tidak membuat Ikhwanul Muslimin ini hancur. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi yang cukup unik. Dia merupakan sebuah organisasi yang berkecimpung di dunia keagamaan, dalam hal ini adalah Islam, sosial, dan politik.<sup>128</sup>

Ikhwanul Muslimin terkadang memilih menggunakan cara kekerasan untuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. Ikhwanul Muslimin juga seringkali menyesuaikan strateginya dengan angin politik yang sedang berhembus. Hal ini dibuktikan saat Ikhwanul Muslimin mencoba mengambil hati Mubarak ketika pemerintahan Mesir sedang bersitegang dengan kelompok Islam radikal. Ketika itu Ikhwanul Muslimin muncul sebagai sebuah organisasi Islam moderat.

Dalam pemerintahannya, Mubarak menjalin hubungan yang dapat dikatakan cukup baik dan lebih akomodatif dengan pihak oposisinya, yaitu dengan memberi ruang kepada mereka agar pihak oposisi dapat menyalurkan aspirasinya.<sup>129</sup> Hal ini dilakukan Mubarak karena dia sadar bahwa “Kebangkitan Islam” bukanlah kekuatan asing yang merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan sebelumnya yang telah berlangsung lama dan melibatkan banyak unsur sesuai perkembangan demokrasi dan kapitalisme. Keleluasaan yang diberikan oleh Mubarak agar Ikhwanul Muslimin dapat bekerja sama dengan pemerintah supaya tidak memunculkan kelompok Islam yang lebih radikal tidak lagi menentang pemerintahan Mubarak, namun pemerintah sendiri akan membatasi gerak-gerak Ikhwanul Muslimin agar tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam politik Mesir. Pemerintah Mesir memang tidak mengakui Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah partai politik, namun

---

<sup>128</sup> Barry Rubin. *The Muslim Brotherhood: The Organization and Political of a Global Islamic Movement* (United States: 2010, h. 39.

<sup>129</sup> Rizfa Amalia. *Op Cit.* h. 39

diakui sebagai semi organisasi.<sup>130</sup> Pemerintahan Mubarak juga mengizinkan Ikhwanul Muslimin untuk ikut dalam pemilihan umum parlemen dan berkoalisi dengan partai politik lainnya. Pada 1980 sampai 1990, Ikhwanul Muslimin lebih menunjukkan eksistensinya dalam bidang agama, baik secara moderat maupun militan. Pada Agustus 1995, Mubarak menangkap ratusan aktivis Ikhwanul Muslimin ke pengadilan militer yang biasanya digunakan untuk mengadili para tersangka teroris.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Mubarak juga melakukan tindakan dan kebijakan terhadap Ikhwanul Muslimin. Berbeda dengan *Al-Jamaah Wa Jihad*, Ikhwanul Muslimin lebih moderat. Dalam hal ini, Mubarak sempat memberikan keleluasaan terhadap kegiatan-kegiatan Ikhwanul Muslimin, misalnya mengizinkan Ikhwanul Muslimin mengikuti pemilihan umum meskipun hanya berkoalisi dengan salah satu partai politik. Meskipun diberi kebebasan, Mubarak tetap membatasi gerak-gerik para anggota Ikhwanul Muslimin serta menangkap kemudian menghukum anggota yang dianggap mengancam kekuasaan Mubarak.

Dinamika politik Timur Tengah yang rawan konflik sangat mempengaruhi politik luar negeri Mesir. Di era pemerintahan Husni Mubarak, Mesir merupakan negara sekutu AS yang membantu keberlangsungan kepentingan AS di Timur Tengah terutama terkait keberadaan Israel yang terjalin sejak penandatanganan perjanjian Camp David. Kedekatan AS dan Mesir menyebabkan politik luar negeri Mesir cenderung menguntungkan kepentingan-kepentingan AS di Timur Tengah dan banyak merugikan kelompok-kelompok Islam yang merupakan kelompok dominan di Timur Tengah. Pemerintah Mesir mengembangkan sekulerisme dan membantu AS membelenggu gerakan-gerakan Islam yang diyakini AS sebagai kelompok-kelompok teroris yang mengancam keamanan internasional.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>*Ibid.* Hal. 40

<sup>131</sup>Robert. S. Leiken and Steven Brooke. *The Moderate Muslim Brother*. *Jurnal Foreign Affairs*, Vol. 86, No. 2 (Mar-April, 2007), h. 121.

Keberpihakan Mesir terhadap dunia barat menghilangkan jati diri Mesir sebagai bangsa Arab. Mesir kehilangan kepercayaan dan kekuatan untuk merangkul persatuan bangsa Arab seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasir. Mesir semakin terpuruk dalam kendali AS, semakin tergantung pada bantuan ekonomi AS dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap konflik disekitarnya yang berkaitan dengan agresi Israel.

Setelah terjadinya pergolakan di beberapa negara kawasan Timur Tengah (*Arab Spring*), demonstran Mesir berhasil memaksa Husni Mubarak untuk mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan kekuasaan sementara pada Dewan Agung Militer. Kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam terbesar di Timur Tengah mendapatkan peluang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat untuk memerintah Mesir. Pada pemilihan parlemen tahun Desember 2011 hingga Januari 2012, FJP sebagai sayap politik Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan umum dengan mendapatkan 47,2% suara. Ikhwanul Muslimin juga mendapatkan kepercayaan rakyat dengan terpilihnya Muhammad Mursi salah seorang petinggi IM sebagai presiden terpilih Mesir untuk menjalankan pemerintahan yang baru.

Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan muslim terbesar di Mesir dan Timur Tengah bahkan paling berpengaruh di Dunia. IM menilai hegemoni AS yang kuat di Timur Tengah dan Mesir memberikan dampak buruk terhadap dunia Islam. IM didirikan sejak tahun 1928 dibangun atas dasar keinginan untuk mengembalikan semua aspek kehidupan masyarakat pada ajaran Islam. Ikhwanul Muslimin memandang AS telah melakukan penindasan terhadap kelompok-kelompok Islam apalagi keberpihakannya terhadap Israel yang menduduki Palestina. Meskipun gerakan ini mendapatkan tekanan yang sangat kuat sejak didirikan namun terus berkembang pesat menjadi kekuatan paling berpengaruh terhadap peta politik di Timur Tengah. Setelah Ikhwanul Muslimin menguasai Mesir, Ikhwanul Muslimin menata ulang negara Mesir dengan menekankan aspek demokrasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan Ideologi yang mendasar dari kepemimpinan Ikhwanul Muslimin dari pemerintahan

sebelumnya akan berpengaruh pada arah kebijakan luar negeri Mesir pasca terjadinya revolusi.

## 2. *Ikhwanul Muslimin Di Era Muhammad Mursi*

Era Muhammad Mursi, Politik luar negeri Mesir untuk Palestina semakin berkembang setelah Mesir berada di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi. Pada tahun 2012 atau ketika Muhammad Mursi memimpin Mesir, perbatasan Mesir-Palestina kembali dibuka, dan rakyat Palestina diizinkan untuk memasuki Mesir tanpa visa. Sembari membela hak-hak rakyat Palestina, Mesir dengan dukungan pihak pertahanan terus mengkritik operasi militer yang dilakukan Israel di Gaza. Perbatasan Rafah dibuka selama 12 jam, dan dibuka enam kali dalam seminggu, dan penduduk Gaza yang berusia antara 18-40 tahun harus melapor untuk dapat melintasi perbatasan tersebut, sementara wanita dan anak-anak tidak perlu melapor. Mereka yang menggunakan perbatasan untuk tujuan berdagang dalam skala besar masih dipertimbangkan untuk dapat melintasi perbatasan tersebut.

Duta besar Mesir untuk Israel ditarik dan duta besar Israel untuk Mesir mendapat protes resmi dari Mesir. Dan orang yang ada di balik dukungan nyata Mesir ini adalah presiden terpilih hasil pemilu, Muhammad Mursi. Mursi terpilih menjadi presiden Mesir pada 8 Juli 2012. Mursi pernah menyatakan bahwa "*The Israelis must realise that this aggression is unacceptable and would only lead to instability in the region*". Liga Arab mendukung protes terhadap Israel dengan melakukan serangkaian pertemuan dan meminta dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Semenjak Mursi berkuasa, hubungan Mesir-Palestina sangat aktif, selain membuka kembali perbatasan Rafah, pada 29 November 2012, Mesir juga mendukung Palestina menjadi anggota PBB dengan upaya voting *United Nations General Assembly resolution 67/19*. Keputusan resolusi tersebut menjadikan Palestina sebagai salah satu peninjau non-anggota di PBB, posisi tersebut sama seperti Vatikan.

Dibukanya kembali perbatasan Rafah menunjukkan keberhasilan kebijakan luar negeri Mursi, karena dianggap lepas dari tekanan Israel. Dibukanya kembali perbatasan memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1.5 juta orang mendapatkan akses ke dunia yang lebih luas, karena selama ini mereka merasa di blokade oleh Israel dan dihalang-halangi oleh Mesir. Terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di The National, UEA, menunjukkan adanya gap antara Mesir dan Israel, dan menunjukkan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan Israel.

Masyarakat Palestina terutama Gaza menyadari bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada Mursi, yang akan lebih simpati dengan mereka, dan memiliki kedekatan ideologis dengan organisasi nomor satu di Gaza, HAMAS. Diakui Mesir, bahwa pembukaan perbatasan Rafah belum mengakhiri blokade terhadap Gaza, namun ini menunjukkan perubahan yang signifikan.

Politik domestik Mesir mengalami kekisruhan di tahun 2013 yang menyebabkan Mursi harus mundur dari jabatan. Turunnya Mursi dari presiden menyebabkan militer kembali berkuasa di Mesir. Perubahan politik domestik ini kemudian mempengaruhi urusan luar negeri Mesir seperti isu Palestina. Tak lama setelah penggulingan Mursi pada 3 Juli 2013, militer kembali menutup perbatasan Rafah, dengan alasan terjadi penembakan terhadap 20 orang polisi di dekat perbatasan dan pelakunya diduga dari militan HAMAS. Peristiwa ini menjadi perhatian karena selama masa Mursi memimpin, perbatasan Rafah dilewati 1200 orang tiap harinya. Penutupan kembali perbatasan Rafah diduga dipengaruhi pihak lain terutama Israel, dan HAMAS memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemerintahan Mesir yang berasal dari latar belakang militer.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syahid Hasan Al Banna merupakan seorang sosok manusia yang dipandang sebagai tokoh pembaharu Islam yang layak disejajarkan dengan tokoh-tokoh pembaharu yang muncul pada masa-masa sebelumnya. Dengan karakter yang melekat pada dirinya. Hasan Al Banna mempunyai kelebihan berupa akhlak Islami yang sangat tinggi dan madzhar (penampilan) Islami yang menakjubkan. Diantaranya; Jujur dan Benar, Sopan dan Tawadhu', Semangat Dakwah yang Tinggi, serta Zuhud dan Sederhana.
2. Metode gerakan Islam yang dilakukan oleh Hasan Al Banna dalam melakukan strategi perubahan sebagai yakni: prinsip dasar dari pemikiran Hasan Al Banna adalah kekuatan iman dan kedalaman pemahaman, langkah-langkahnya melalui pembinaan (tarbiyah), serta meluruskan konsep-konsep keliru yang dianut oleh masyarakat secara umum
3. Hasan Al Banna menjelaskan sasaran dari setiap harapan untuk mencapai sasaran pokok, yakni: pendidikan pribadi muslim ideal, membangun dan membina rumah tangga muslim, dan perbaikan masyarakat sehingga menjadi Islamis.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap metode gerakan Islam Hasan Al Banna, maka penulis mencoba menyumbangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Inti kandungan gerakan Islam Hasan Al Banna ini mengharuskan pada pergerakan akal umat agar menjadi paham, pergerakan hati mereka agar beriman, pergerakan semangat mereka agar mempunyai tekad, pergerakan tangan mereka agar bekerja, meskipun penghimpunan dan pemersatuan umat adalah salah satu tujuan Al Ikhwan.

2. Para da'i Muslim dalam setiap saat harus mengetahui hakikat keislamannya secara sempurna dan jelas, mereka harus memahami karakter aqidah yang diembannya. Mereka harus mengetahui gambaran khas aqidah dan strukturnya yang tak tertandingi aliran pemikiran yang lain. Dakwah Islam berdiri sendiri, lepas sama sekali dari berbagai ikatan dakwah non Islam.
3. Untuk lebih meningkatkan lagi dakwah Islam khususnya kepada kaum muslimin, untuk mewaspadaikan pengaruh yang dapat merasuki jiwa penganutnya, seiring dengan perkembangan zaman.
4. Sepenuhnya menyadari bahwa gerakan Islam adalah kegiatan massa yang berdasarkan pada kesadaran diri, dan keswadayaan imaniah semata mengharap ridho Allah, bukan mencari pamrih dari manusia.
5. Dalam melakukan dakwah, selalu melangkah dengan berpihak rasa cinta pada agamanya, komitmennya pada Allah dan Rasulnya, dan ummatnya yang mengalami banyak kekurangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abduh, Muhammad Syakir , 1979, *Risalah Tauhid*, Jakarta, Bulan Bintang.  
Abdurahman, Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999).



- Al- bahnasawi , Sali ali. 1995, *Wawasan Sistem Politik Islam* , Jakarta : Pustaka Al- Kautsar.
- Al- ghazali, Abdul hamid. 2001, *Meretas jalan Kebangkitan Islam* , Solo: Era Intermedia
- Al Husain, Ishak Musa, 1983, *Ikhwanul Muslimin; Tinjauan Sebuah Gerakan Islam Bawah Tanah*, Jakarta, Grafiti Press.
- Al-Banna Hasan, *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al-Banna*, Khozin,penj. Jakarta: Al-I'Tishom Cahaya Umat,2005
- . *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Cet. VI; Jakarta: Mizan, 1996
- \_\_\_\_\_, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Terj. Anis Mata,Solo:Intermedia, 2001
- al-Qaradhwawi, Yusuf, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasah Hasan al-Bannā*,(Kairo: Maktabah Wahbiyyah, 1992).
- Anwar Al-Jundi, *Biografi Hasan Al-Bana*, Solo: Media INSANI Press,2003
- Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1990).
- Fikri AF, Ahmad, *Menjadi Politisi Ekstra Parlementer* (Yogyakarta, LKIS & The Asia Foundation, 1999).
- Hanafi , Hasan. 2003, *Aku Bagian dari Fundamentalis Islam* , Yogyakarta: Futuh Printika
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*(Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006).
- Hendrik Rapar, Jon, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta, Pustaka Filsafat, 1996).
- Ihsanudin, Mahfud, *Pemikiran Politik Islam Al-Banna Dan Pengaruhnya Terhadap Mesir Tahun 1928-1949 M*, (Yogyakarta: Fak. Adab dan Ilmu Budaya, 2009).
- Iqbal, Muhammad, 2010, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Kencana.
- Ishaq, Muhith Muhammad, 2012, *Fiqh Politik Hasan Al-Banna*, Jakarta, Rabbani Press.

- Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyegarannya*, terj. A. Najiyullah (Jakarta, I'tishom Cahaya Umat, 2002).
- Lubis, Amany, 2008, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, UIN Press.
- Manshur, Mustafa, (tanpa tahun terbit), *Prinsip dan Penyimpangan Gerakan Islam*, Jakarta, Rabbani Press.
- Mohammad, Herry, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Mohammad, Herry, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Mubarok, Jaik. 2004, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad Ma'mun Hudaiby, *Politik Islam Dalam Pandangan Ikhwanul Muslimin*, Bandung: PT.Syamil Cipta Media,2003
- Mu'iz Ruslan, Utsman Abdul, *Tarbiyah siyasiah : pendidikan politik Ikhwanul Muslimin : studi analisis evaluatif terhadap proses pendidikan politik "ikhwan" untuk para anggota khususnya dan seluruh masyarakat Mesir umumnya dari tahun 1928 hingga 1954*, (Solo : Era Intermedia, 2000).
- Nasution, Harun., *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: jambatan, 1992.
- Rahman, Jalaluddin. *Orasi Pengukuhan Guru Besar dengan Judul Metodologi Pembaharuan Sebuah Tuntutan Kelanggengan Islam*. Makassar: Berka Utami, 2001
- Rahnema, Ali. at.al, *Para perintis zaman baru Islam*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1998
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara* ( Jakarta : UI Press, 1990).
- Sani, Abdul, *Lintas Sejarah Pemikiran; Sejarah Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998).
- Soebantardjo, 1954, *Sari Sejarah Asia*, Jilid I, Jogjakarta, Bopkri.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta, LP3ES.

- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia, 1992).
- Syafi'i, Ma'arif Ahmad. *Membumikan Islam. Cet. I*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.417.
- \_\_\_\_\_, *Matodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media), h. 16-18.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan,DR, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*. Solo :Era Intermedia, 2000.
- Zallum, Abdul Qadum.2001, *Pemikiran Politik Islam*, Jawa Timur: Penerbit Izzah.